

EDITORIAL

Krisis Teladan di Daerah



TUGAS seorang kepala daerah sejatinya tidak hanya menandatangani anggaran. Ia juga ‘menandatangani’ budaya kerja birokrasi dan pemerintahan. Ketika yang ditandatangani ternyata praktik suap, proyek titipan, atau jual beli jabatan, yang rusak tidak hanya keuangan negara, tapi juga karakter birokrasi. Lalu, akan muncul anggapan bahwa kekuasaan ternyata bisa dipakai untuk memperkaya diri.

Saat ini, rentetan penangkapan kepala daerah oleh KPK telah sampai pada titik yang tidak lagi bisa dipandang sebagai kumpulan kasus yang berdiri sendiri. Sepanjang 2026 saja ada 12 kepala daerah berurusan dengan hukum karena perkara korupsi. Bahkan, jika dihitung sejak pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 pada Februari 2025, jumlahnya telah mencapai 18 orang.

Penangkapan beruntun dengan frekuensi sebesar itu mengirimkan satu pesan yang jelas bahwa persoalannya bukan lagi sekadar individu yang tergoda korupsi. Soal utamanya ialah sistem pemerintahan daerah yang gagal mencegah korupsi berulang dengan pola yang hampir selalu sama.

Polanya memang tak banyak berubah. Ada pengaturan proyek, suap pengadaan barang dan jasa, permainan perizinan, hingga jual beli jabatan. Modusnya mungkin berganti kemasan, tetapi substansinya tetap sama, yakni penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Jika pola kejahatan terus berulang, logikanya sederhana, bahwa celah yang dimanfaatkan pelaku tidak pernah benar-benar ditutup.

Karena itu, strategi pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada keberhasilan operasi tangkap tangan. Penindakan memang penting untuk memberikan efek jera, tetapi negara tidak boleh hanya sibuk menangkap pelaku tanpa memperbaiki sistem yang terus melahirkan pelaku baru. Keberhasilan KPK mengungkap perkara mestinya dibaca sebagai alarm bahwa mekanisme pencegahan di daerah belum bekerja penuh.

Dampak yang lebih mengkhawatirkan sesungguhnya bukan hanya kerugian keuangan negara. Yang sedang dipertaruhkan ialah masa depan birokrasi daerah. Setiap tahun ribuan aparat sipil negara (ASN) muda memasuki pemerintahan dengan idealisme untuk mengabdikan. Bukan hanya dari aturan, para ASN muda itu juga belajar dari perilaku pemimpin mereka.

Namun, ketika mereka sudah masuk birokrasi dan menyaksikan proyek dapat diperjualbelikan, jabatan bisa diperdagangkan, kewenangan bisa dijadikan alat mengumpulkan rente, sebetulnya mereka sedang menerima pelajaran yang keliru tentang bagaimana kekuasaan dijalankan.

Di situlah letak bahaya sesungguhnya. Korupsi kepala daerah berubah menjadi budaya birokrasi. Kompromi terhadap penyimpangan dianggap sebagai bagian dari mekanisme kerja pemerintahan. Jika kondisi ini dibiarkan, yang akan hilang bukan semata uang rakyat yang dikorup, melainkan juga keteladanan. Minimnya teladan pada ujungnya akan menciptakan generasi birokrat yang tidak resisten terhadap korupsi.

Perombakan menyeluruh terhadap sistem pengawasan daerah tidak lagi dapat ditunda. Inspektorat daerah harus diperkuat agar tidak sekadar menjadi pengawas administratif yang posisinya berada di bawah kepala daerah yang diawasi. Pemerintah kiranya juga perlu membangun sistem peringatan dini yang mampu membaca pola-pola penyimpangan sejak awal, bukan baru bertindak setelah uang negara berpindah tangan.

Pada saat yang sama, pembenahan tidak boleh melupakan akar persoalan, yakni mahalnnya biaya politik. Maka, reformasi tata kelola pendanaan politik harus jadi bagian penting dari agenda pemberantasan korupsi.

Menangkap pelaku tanpa membenahi sumber persoalan hanya akan membuat daftar tersangka terus bertambah dan, sejujurnya, itu bukanlah prestasi.

Sekali lagi harus kita katakan, menangkap kepala daerah korup memang penting. Akan tetapi, membangun sistem yang membuat siapa pun takut dan sulit melakukan korupsi jauh lebih mendesak. Bangsa ini tidak sedang kekurangan pemimpin. Bangsa ini sedang membutuhkan lebih banyak pemimpin yang layak diteladani karena kukuh menjauh dari korupsi.

Silakan tanggapi melalui:
www.mediaindonesia.com
dan www.metrotvnews.com
Simak tayangannya di:
www.mediaindonesia.com/editorials

UU TPPO Lemah, Korban Berjatuh

- Aparat cenderung menyelesaikan perkara sebatas pelanggaran administratif pekerja.
- Harmonisasi sistem hukum dalam penanganan perdagangan orang dengan KUHP mendesak.
- Kolaborasi perlindungan harus sampai ke pelosok desa karena banyak korban berasal dari sana.

RAHMATUL FAJRI
rahfaj@mediaindonesia.com

SETIAP tahun sedikitnya ribuan warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Perlindungan oleh negara pun dinilai masih lemah.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO sudah sangat mendesak untuk diperbarui. Perluasan modus TPPO saat ini, mulai dari eksploitasi seksual, kerja paksa, pengambilan organ tubuh, hingga kejahatan siber, tidak diimbangi oleh kepastian hukum.

Adanya dualitas antara Undang-Undang TPPO dan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, misalnya, membuat penyelesaian kasus kerap terjebak pada ranah pragmatis. “Aparat cenderung menyelesaikan perkara sebatas pelanggaran administratif pekerja tanpa dokumen ketimbalan membongkar kejahatan TPPO secara utuh,” kata Willy dalam keterangannya, kemarin.

PINTU IMPUNITAS

Poin lain yang didorong Willy untuk direvisi ialah Pasal 8 UU TPPO. Pasal tersebut dinilai memberikan pintu imunitas bagi penyelenggara negara karena mensyaratkan adanya hubungan kausalitas langsung antara tindakan oknum dan terjadinya TPPO.

Padahal, imbuh Willy, banyak kasus melibatkan oknum bi-

rokrasi sejak tahap administrasi dan perekrutan. “Kita tahu juga beberapa kasus TPPO itu melibatkan oknum yang mengeluarkan administrasi. Apalagi kalau eksploitasi yang dimaksud ternyata belum terjadi tapi para pelaku sudah menjalankan upaya perekrutan, pengebakan, dan lainnya,” ungkapnya.

KONSISTENSI NEGARA

Selaras dengan usulan revisi regulasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Masyarakat Yusril Ihza Mahendra mendorong pembaruan sistem hukum dalam penanganan TPPO. Pembaruan itu dinilai mendesak dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional pada 2026.

Di sisi lain, Yusril menekankan efektivitas pemberantasan perdagangan orang tidak ditentukan oleh banyaknya regulasi, tetapi kemampuan negara menjalankan hukum secara konsisten dan melindungi korban.

“Memastikan setiap lembaga memahami perannya, korban mengetahui akses perlindungan yang tersedia, aparat mampu mengumpulkan bukti secara sah, pengadilan memberikan putusan yang adil, dan hasil kejahatan tidak terus dinikmati oleh pelaku,” papar Yusril.

PENIPUAN DARING

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menyebut salah satu tantangan paling mendesak dalam konteks perlindungan manusia saat ini ialah



ANTARA/WAHIDI SEPTIYAN

PENYERAHAN BAYI KORBAN TPPO: Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Batang Hari, Neneng Eva Anggraeni (kanan), menyerahkan bayi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kepada ibu kandung korban, Pemi Sri Rohani, di Kantor Polda Jambi, Jambi, Rabu (29/7). Polda Jambi memfasilitasi pemulangan bayi berusia delapan bulan tersebut kepada ibu kandungnya setelah terpisah sejak 7 Juli 2026 akibat dugaan TPPO yang melibatkan suami korban, sekaligus mengambil alih penanganan perkara itu dari Polres Batang Hari.

TPPO di Era Digital: Modus makin Beragam

Data Kasus TPPO

2023	2024	2025
• 290 perkara • 3.104 korban	• 621 perkara • 1.794 korban	• 353 perkara • 1.114 korban

Catatan: Data menunjukkan perkara yang ditangani/diungkap Polri, bukan estimasi seluruh kejadian TPPO.

Modus TPPO di Era Digital

- Eksploitasi seksual.
- Tawaran kerja bergaji tinggi dengan proses mudah.
- Magang ilegal yang berujung eksploitasi.
- Online scam/scam centre yang merekrut korban untuk bekerja secara ilegal.

Teknologi yang Dimanfaatkan Pelaku

- Media sosial untuk merekrut korban.
- Aplikasi percakapan untuk komunikasi dan pengendalian korban.
- Platform lowongan kerja untuk menawarkan pekerjaan palsu.

Dorongan Revisi UU TPPO

Pemerintah didorong merevisi UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO agar mampu menghadapi modus kejahatan berbasis digital.

Usulan Penguatan

- Memperluas definisi dan cakupan TPPO.
- Mengakomodasi modus baru, termasuk scam centre, eksploitasi digital, perekrutan melalui media sosial, dan penyalahgunaan AI.
- Memperberat sanksi bagi sindikat TPPO.
- Memperkuat perlindungan dan pemulihan korban.
- Mendorong platform digital menurut akun yang digunakan untuk perekrutan TPPO.
- Memperkuat koordinasi kementerian/lembaga, pemda, aparat penegak hukum, dan perwakilan RI di luar negeri.

Sumber: Satgas TPPO Polri/Kementerian PPPA/MPR/Litbang MI

maraknya pusat penipuan daring di kawasan Asia, khususnya di Asia Tenggara. IOM mengatakan pusat-pusat penipuan daring berskala besar di Myanmar, Kamboja, dan Laos mempekerjakan hingga sekitar 300.000 orang untuk menjalankan berbagai skema penipuan.

Mereka direkrut melalui iklan lowongan kerja palsu yang menawarkan gaji tinggi bagi pelamar yang memiliki kemampuan bahasa Inggris dan latar

belakang pendidikan tinggi. “Orang-orang yang terjebak di kompleks penipuan adalah korban perdagangan manusia yang dipaksa melakukan kejahatan melalui kekerasan, ancaman, dan pemaksaan,” kata Direktur Jenderal IOM, Amy Pope, dilansir dari AsiaOne, Rabu (29/7).

JABAR TERBANYAK

Di Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat Provinsi Jawa

Barat masih menjadi daerah asal terbanyak dalam permohonan perlindungan korban TPPO.

Ketua LPSK, Achmadi, menekankan penanganan TPPO, termasuk pencegahannya, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Pelibatan harus sampai ke pelosok desa karena banyak korban berasal dari sana. “Kolaborasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sampai pemerintah desa menjadi sangat penting.” (Mir/Ant/X-5)

TESTIMONI PENYINTAS

Dikelabui Teman, Terperangkap Sindikat Penipuan

Archangela pernah melihat orang bekerja dengan infus di lengan demi menghindari potongan gaji yang besar.

ARCHANGELA Giralani, 45, pada 2023 silam tengah bekerja di divisi pemasaran sebuah grup perbankan di Jakarta. Saat didera suatu masalah di kantornya itu, sebuah tawaran pekerjaan ke luar negeri datang dari teman yang juga tetangganya.

Sang teman mengajaknya bekerja di Manila, Filipina, seperti dia. Archangela melihat tidak ada yang aneh dari temannya itu yang sudah dua tahun bekerja di Manila. “Dia menawarkan pekerjaan bidang penawaran investasi. Dia juga tahu background saya itu kerja di perbankan sebagai pemasaran,” ujar Archangela saat bercerita

kepada *Media Indonesia*, Rabu (29/7).

Ia ditawarkan gaji sekitar Rp10 juta. Angka tersebut, kata si teman, adalah gaji bersih. Kebutuhan tempat tinggal dan makan ditanggung perusahaan, ditambah bonus. Durasi kontraknya 6 bulan. Archangela tidak langsung setuju. Sempat ada rasa khawatir. Akan tetapi, teman tersebut akhirnya berhasil meyakinkannya.

Setiba di Filipina, di bandara ia dijemput temannya melalui jalur khusus. Lalu, Archangela diantar ke gedung perkantoran mentereng 23 lantai. Ia diberikan ID card layaknya pekerja kantor.

TIDAK PEDULI

Sebelum mulai bekerja, paspornya sudah diambil dengan dalih untuk pengurusan visa kerja. Tibalah waktu untuk mulai bekerja. Archangela

diberi tahu ia harus melakukan pekerjaan *scamming* (penipuan) investasi alias investasi bodong. “Goal-nya itu yang diajarkan di sana ialah enggak peduli orang itu punya uang atau enggak. *Sampe* dia bunuh diri juga mereka enggak peduli,” ungkapnya.

Archangela langsung mengutarakan bahwa pekerjaan seperti itu tidak sesuai hati nuraninya. Ia meminta pulang secara baik-baik. Namun, perusahaan mengatakan ia harus membayar denda jika tidak jadi bekerja. Padahal, Archangela belum menandatangani kontrak kerja.

Ia pun menyadari dirinya dalam situasi yang tak aman. Archangela memperhatikan para sekuriti di gedung tempatnya bekerja diperlengkapi senjata api. Di titik itu Archangela belum sadar bahwa ia menjadi korban

perdagangan orang. Sampai suatu hari ia berkomunikasi dengan temannya dari Talitha Kum, jaringan internasional biarawati Katolik, yang menduga bahwa Archangela telah menjadi korban.

PERLAKUAN BURUK

Archangela pun mulai mencari tahu dari pekerja lain. Ternyata banyak yang bekerja berlebihan hingga hanya bisa tidur 3 jam, tanpa libur. Mereka bahkan tidak menyadari diperlakukan buruk.

Archangela pernah melihat orang bekerja dengan infus di lengan demi menghindari potongan gaji yang sangat besar jika absen.

Setelah dua bulan terkurung, Archangela berhasil mendapati cara untuk keluar dengan memakai alasan ke gereja. Dalam pelariannya, selama satu bulan ia tinggal di rumah aman

sambil mengurus kepulangan ke Indonesia dibantu Talitha Kum dan International Justice Mission (IJM).

Archangela mengaku tidak melibatkan pemerintah Indonesia. “Karena waktu itu saya juga takut. Kalau pulang, TPPO harus ke Bareskrim, ke pengadilan,” katanya.

Sebagai penyintas, Archangela membantu advokasi antiperdagangan orang hingga dipercaya menjabat direktur dari komunitas penyintas United Resilience Network (URN) di kawasan Asia-Pasifik.

Ia pun berpesan kepada masyarakat agar jangan tergiur dengan iming-iming gaji besar. “Jadi bagi generasi muda, untuk pergi ke sana pikir panjang dulu. Sebenarnya di Indonesia banyak kok, asal kita kreatif, pekerjaan yang bisa mencukupi,” pungkasnya. (Ihfa Firdausya/X-5)

TENDANGAN BEBAS

Jalan Panjang Spanyol

SPANYOL telah mengukuhkan diri untuk menjadi juara dunia kedua kalinya. Gaya permainan tiki-taka para pemain muda ‘La Furia Roja’ membuat mahabintang sekelas Lionel Messi pun tidak mampu membendung mereka. Messi pun harus melepas gelar juara dengan air mata.

Kesuksesan yang diraih Spanyol bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Itu buah konsistensi untuk menanamkan kolektivitas sebuah permainan sepak bola.



SURYOPRATOMO
Pemerhati sepak bola

Spanyol mengajarkan kepada para pemain di semua tingkatan untuk tahu apa yang harus dilakukan ketika kehilangan bola. Bagaimana secepat mungkin merebut bola agar kendali permainan bisa dipertahankan.

Practice makes perfect. Latihan rutin yang dilakukan secara terus-menerus membuat para pemain sepak bola Spanyol menjadi master dalam memanfaatkan ruang dan waktu. Semua itu dipadukan dengan keindahan sehingga enak untuk ditonton.

Kesabaran mereka untuk membongkar pertahanan lawan pantas dikagumi. Bahkan ketika 90 menit pertandingan berlalu, tim asuhan Luis de la Fuente tetap konsisten dengan kebersamaan membongkar pertahanan lawan. Mereka tidak takut kehabisan waktu dan terus berupaya untuk menjebol gawang lawan.

Filosofi untuk selama mungkin menguasai bola dan jangan biarkan lawan mengendalikan permainan

membuat ancaman ke gawang Spanyol menjadi kecil. Bayangkan, tim sekelas Argentina, yang tiga kali menjadi juara dunia, tidak mampu sekali pun mengancam gawang Unai Simon sepanjang 120 menit pertandingan.

Spanyol tidak sekadar menjadi juara dunia. Mereka tidak terkalahkan sepanjang kejuaraan dan paling sedikit kebobolan. Dari delapan pertandingan Piala Dunia 2026, Rodrigo Hernandez dan kawan-kawan hanya kebobolan satu kali.

TIDAK BISA DICONTOH

Gaya permainan yang diperlihatkan Spanyol tidak bisa ditiru negara lain. Itu bukan sekadar sebuah permainan. Itu sebuah kultur yang dibangun dan kemudian menjadi karakter Spanyol. Kunci utamanya ialah kolektivitas bermain.

Kapten Jerman di Piala Dunia 2014, Philipp Lahm, dalam artikelnya di *The Guardian* secara tegas menyebutkan itu. Jerman yang gagal total di tiga Piala Dunia terakhir tidak bisa meniru gaya Spanyol jika ingin membangun kembali kebesaran mereka yang sudah 12 tahun terpuruk.

Karena sepak bola berkaitan dengan kultur dan karakter bangsanya, Jerman pun harus berbasis kepada itu. Karakter Jerman yang membuat mereka bisa empat kali juara dunia ialah mentalitas *Turniermannschaft*.

Sebagai tim turnamen, Jerman selalu telaten mempersiapkan diri menjelang kejuaraan. Fisik pemain benar-benar ditempa untuk bisa bermain secara konsisten selama 90 menit. Dengan kondisi fisik yang tangguh, para pemain selalu akurat saat bermain dengan bola, termasuk saat melakukan tendangan penalti.

Pilihan pemain untuk menjadi ‘Die Mannschaft’ dilakukan secara saksama dan posisi pemain terpilih di dalam klub sama ketika ia tampil untuk tim nasional. Formasi terbaik sudah terbentuk sebelum kejuaraan dimulai dan dimatangkan ketika Piala Dunia bergulir.

Semua kebiasaan itu dilanggar pelatih Julian Nagelsmann. Ia selalu mengubah formasi tim setiap kali tampil. Penempatan pemain juga tidak sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan di klub. Kapten kesebelasan Joshua Kimmich yang biasa bermain sebagai gelandang di Bayern Muenchen, misalnya, digeser menjadi bek kanan di tim nasional.

Akibatnya Jerman kehilangan karakter mereka, karakter untuk membangun serangan dari bawah dengan memainkan tempo yang baru meningkat ketika melihat peluang terbuka untuk bisa ditembus.

Apabila di Piala Dunia 1954 ada Firtz Walter, Piala Dunia 1974 ada Franz Beckenbauer, Piala Dunia 1990 ada Lothar Matthaeus, dan Piala Dunia 2014 ada Bastian Schweinsteiger, kali ini Jerman tidak memiliki

jenderal lapangan yang disegani. Kekuatan serangan sayap seperti Juergen Grabowski, Pierre Littbarski, atau Mesut Oezil, juga tidak tampak di Piala Dunia 2026.

Lerroy Sane lebih seperti penari balet daripada pemain sepak bola. Ia terlalu lembut dalam bermain dan tidak menunjukkan karakter ‘panser’ yang menjadi ciri pemain Jerman.

KARAKTER INDONESIA

Kalau sepak bola tidak bisa dipisahkan dari akar bangsanya, menjadi pertanyaan apa karakter sepak bola Indonesia? Di sinilah tantangan yang sebenarnya harus digali pengurus PSSI.

Tidak bisa kita ikut-ikutan gaya dari negara yang menjadi juara dunia. Apalagi kita tidak telaten untuk melakukan pembinaan sejak usia dini. Kita lebih suka memilih jalan pintas.

Tony Pogacnik dan Wiel Coerver merupakan dua pelatih yang pernah membangun sepak bola dari akar budaya Indonesia. Ia jalan ke banyak wilayah untuk menemukan talenta-talenta sepak bola dan mengasahnya.

Dari ketelatenan dua pelatih besar Indonesia itu lahir pemain-pemain seperti Ramang, Wahyu Tanoto, Kwee Kiat Sek, Soetjipto Soentoro, Iswadi Idris, Abdul Kadir, dan Ronny Pattinasarany. Kemampuan *dribbling* dan sprint pendek yang kuat mem-

bawa sepak bola Indonesia disegani di Asia.

Setelah itu, kita tidak pernah mau membangun sepak bola yang berakar dari kultur bangsa ini. Ambisi untuk segera tampil di putaran final Piala Dunia membuat kita tiba-tiba mengambil kiblat Belanda. Bahkan bukan hanya kiblatnya, melainkan juga mengambil pemain Belanda yang memiliki darah Indonesia. Tidak peduli walaupun mau disebut ‘Londo Ireng’.

Padahal, karakter sepak bola Belanda sejak 1974 ialah *total football*. Mereka mensyaratkan pemain untuk memiliki teknik dasar sepak bola yang sempurna sehingga mampu memainkan peran di posisi apa saja.

Setelah era Wesley Sneijder, Arjen Robben, dan Robin van Persie di Piala Dunia 2010, Belanda pun masih berjuang untuk menemukan tim yang bisa memainkan *total football*. Begitu banyak negara sepak bola seperti Brasil, Uruguay, dan Italia yang belum mampu menemukan lagi karakter dan kolektivitas mereka. Mereka pun tidak mampu menjadi yang terbaik.

Siapakah pemikir sepak bola Indonesia yang mau bekerja dalam diam, melakukan riset tentang sepak bola Indonesia? Tanpa pernah pekerjaan pertama itu kita lakukan, mustahil kita akan memiliki tim sepak bola yang membawa Indonesia tampil di Piala Dunia.

PIDI Setop, Dokter Magang Diskrining Ulang

IDI menekankan skrining kesehatan mesti lebih mendalam daripada sebelumnya dan tidak bersifat superfisial saja.

SETELAH rentetan peristiwa kematian enam dokter *internship* (magang) dalam lima bulan terakhir menjadi sorotan tajam dari publik, Kementerian Kesehatan akhirnya memutuskan untuk meliburkan sementara Program Internship Dokter Indonesia (PIDI).

Kemenkes mengaku tidak mau kecolongan lagi dalam hal pengawasan terhadap dokter peserta *internship*, terutama dalam masalah kesehatan fisik dan kejiwaan. “Oleh karena itu, kita akan lakukan skrining kesehatan kepada 10.564 peserta *internship*,” kata Dirjen SDM Kesehatan Kemenkes Yuli Farianti di Jakarta, kemarin.

Peserta *internship* akan diliburkan dan dibebastugaskan dari 30 Juli sampai 14 Agustus 2026 untuk melakukan dua skrining, yaitu tes kejiwaan dan tes *medical check-up* (MCU) ulang.

Yuli menegaskan penghentian sementara program itu diperuntukkan para peserta lebih tenang, mereka tidak capai, dan hasilnya valid. “Kita pastikan ini berjalan dengan baik. Seharusnya ini kewajiban provinsi, kabupaten, atau kota, tapi tidak berjalan. Akhirnya pusat intervensi,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wiweka mengatakan skrining kesehatan tersebut diharapkan lebih mendalam daripada sebelumnya dan tidak bersifat superfisial saja. Selain kejiwaan dan penyakit kronis, para dokter itu perlu menjalani pemeriksaan HIV/AIDS dan narkoba.

“Banyak sekali jenis lingkungan yang mereka hadapi, jadi tidak tertutup kemungkinan terpapar oleh hal seperti itu,” kata Wiweka.

JANGAN GANGGU LAYANAN

Guru Besar Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI-RSCM Ari Fahrrial Syam mendukung langkah pemeriksaan kesehatan ulang bagi peserta PIDI agar tidak ada lagi kasus kematian dokter *internship*.

Meski begitu, Ari minta pemerintah memikirkan matang dampaknya kepada masyarakat karena ada ribuan dokter yang tidak bisa melayani. “Dokter *internship* sebenarnya juga sudah dokter dan memberikan pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit,” ujar Ari.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Irma Suryani menilai MCU ulang kepada 10.564 peserta PIDI memang dibutuhkan mengingat banyaknya kasus kematian yang menimpa para dokter magang. “Sebelumnya dibutuhkan skrining kesehatan dan kesehatan mental tidak saja untuk *internship*, tapi untuk seluruh dokter,” kata Irma saat dihubungi, kemarin.

Selain itu, ia menegaskan Kemenkes perlu kembali membangun pengawasan pelaksanaan PIDI di seluruh rumah sakit untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan, perundungan, atau meninggalnya peserta. “Ke depan harus ada peraturan menteri yang lebih baik,” ia menegaskan. (lam/X-3)



ANTARA/FAHRI HERMANSYAH

Gaji Kepala Daerah bakal Direformulasi

- Kepala daerah kerap tidak memahami tata kelola birokrasi pemerintahan.
- Penaikan gaji kepala daerah diharapkan bisa meminimkan korupsi.
- Vonis rendah membuat koruptor tidak akan jera.
- Gubernur nonaktif Riau divonis 2 tahun penjara dari tuntutan 8,5 tahun.

RAHMATUL FAJRI
rahfaj@mediaindonesia.com

PEMERINTAH mungkin akan merevisi formulasi mengenai hak keuangan atau gaji bagi kepala daerah untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, kemarin, mengungkapkan aturan mengenai gaji kepala daerah sudah 26 tahun tidak berubah. Sementara itu, kondisi ekonomi saat ini sudah jauh berbeda.

“Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan revisi, tapi tentunya nanti kami akan buat tim lagi di tingkat pemerintah ya, kami akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas,” kata Tito.

Terkait dengan maraknya kepala daerah tertangkap dalam kasus korupsi, Tito menilai sering kali berakar pada beragamnya

latar belakang latar profesi sebelum menjabat, mulai pengusaha hingga kalangan artis.

Kondisi tersebut, menurutnya, membuat sebagian kepala daerah tidak memahami tata kelola birokrasi pemerintahan sehingga rentan melakukan kekeliruan atau bahkan dimanfaatkan bawahannya.

MINIMKAN KORUPSI

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyambut reformulasi penyesuaian hak keuangan, yakni gaji, tunjangan, dan biaya operasional yang sudah tidak relevan dengan beban kerja saat ini.

“Aturan tersebut sudah terlalu lama, 26 tahun tepatnya, dan pada saat 2000 itu, mekanisme pemilihan kepala daerahnya masih dilakukan di DPRD. Terjadi dinamika politik, perkembangan kompleksitas tugas, dan seterusnya yang sangat tinggi,” ujar

Aturan Gaji Kepala Daerah



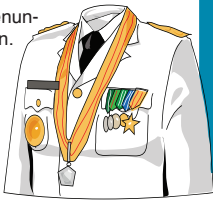
BESARAN gaji pokok kepala daerah masih mengacu pada PP No 59 Tahun 2000 tentang perubahan hak keuangan/ administratif kepala daerah dan wakil kepala daerah secara lebih luas diatur dalam PP No 109 Tahun 2000.

Gaji pokok per bulan

- Gubernur: sekitar Rp3 juta
- Wakil gubernur: sekitar Rp2,4 juta
- Bupati/wali kota: sekitar Rp2,1 juta
- Wakil bupati/wakil wali kota: sekitar Rp1,8 juta

Komponen lain, antara lain

- Tunjangan jabatan.
- Biaya operasional.
- Fasilitas penunjang jabatan.



Skema yang sedang Dikaji

- Kemendagri sedang menyusun formulasi remunerasi kepala daerah.
- Sejumlah opsi yang dikaji antara lain
 - Peningkatan pagu upah pungut.
 - Penambahan biaya operasional.
 - Pengaturan insentif dari BUMD.

Mengapa Remunerasi Dikaji?

- Besaran gaji pokok dinilai tidak sebanding dengan tanggung jawab kepala daerah.
- Tingginya biaya politik menjadi salah satu persoalan yang disoroti.
- Remunerasi yang lebih memadai diharapkan turut mendukung upaya pencegahan korupsi.

Sumber: Kemendagri/AntaraneWS/Litbang MI

Rifqinizamy.

Rifqi, sapaan Rifqinizamy, berharap perbaikan gaji, tunjangan, dan biaya operasional itu dapat meminimkan potensi penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi di tingkat daerah. “Ujungnya salah satunya kita tentu berharap potensi penyalahgunaan kewenangan termasuk korupsi di dalamnya bisa kita minimkan. Tentu ini bukan satu-satunya cara, tapi ini aspirasi dari para kepala daerah

yang perlu kita lihat lebih objektif ke depan,” pungkasnya.

TIDAK JERA

Terhitung sejak 2025 hingga 29 Juli 2026, ada 17 kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang ditangkap KPK.

Peneliti Pusat Studi Antikorupsi (Saksi) Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah menilai maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah tidak hanya dipicu tingginya biaya

politik, tetapi juga lemahnya efek jera dan belum kuatnya komitmen dalam pemberantasan korupsi.

“Salah satu penyebabnya adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi, termasuk kepala daerah, masih sangat ringan. Rata-rata vonisnya hanya sekitar 1,5 tahun penjara. Hukuman seperti itu jelas tidak akan menimbulkan efek jera,” kata Herdiansyah.

Ia menegaskan, selama hukuman terhadap koruptor tidak diperberat, praktik korupsi akan terus berulang. “Baik pelaku maupun calon pelaku korupsi tidak akan merasa takut,” ujar Herdiansyah.

VONIS RIAU

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Provinsi Riau, kemarin, memvonis Gubernur nonaktif Riau Abdul Wahid dengan dua tahun penjara. Majelis hakim menyatakan Abdul Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu, majelis hakim yang diketuai Delta Tamtama memvonis Abdul Wahid pidana denda Rp200 juta dengan ketentuan jika denda itu tak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp1,45 miliar.

Jaksa KPK sebelumnya menuntut Abdul Wahid dengan 8,5 tahun penjara karena dianggap memaksa bawahannya untuk menyetor hingga Rp2,45 miliar. (Dev/RK/X-4)

Subsidi Kampanye Tekan Biaya Politik

- Pemberian subsidi kampanye nontunai melalui pemanfaatan media yang menggunakan frekuensi publik.
- Perlunya memperkuat independensi lembaga penyelenggara pemilu dalam revisi UU Pemilu.
- Wacana pemberian imunitas bagi penyelenggara pemilu jangan sampai berubah jadi kekebalan hukum.

DEVI HARAHAP
devi.harahap@mediaindonesia.com

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak hanya membahas aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga mencari solusi atas tingginya biaya politik.

Salah satu usulan yang dinilai layak dipertimbangkan ialah pemberian subsidi kampanye nontunai melalui pemanfaatan media publik serta insentif bagi partai politik yang memperkuat keterwakilan perempuan.

“Misalnya bukan mengganti biaya kampanye secara tunai, tetapi mengoptimalkan penggunaan frekuensi publik sebagai ruang kampanye,” ujar anggota KPU RI August Mellaz dalam diskusi publik di Kantor KPU RI, Jakarta, kemarin.

Selain penggunaan fre-



PLENO PENETAPAN REKAPITULASI: Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin (tengah) didampingi anggota KPU RI (dari kiri) Parsadaan Harahap, Iffa Rosita, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz memimpin Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026 di Gedung KPU RI, Jakarta, kemarin. KPU menetapkan jumlah pemilih pada hasil PDPB semester I 2026 sebanyak 214.354.667 orang.

kuensi publik untuk ruang kampanye, menurut dia, subsidi juga dapat dikaitkan dengan upaya peningkatan inklusivitas, seperti mendorong representasi perempuan di lembaga legislatif. “Ketika partai politik mencalonkan calon perempuan lebih banyak, maka porsi kampanye, biaya kampanyenya tuh dalam konteks frekuensi

publiknya lebih besar,” ujarnya.

KEUANGAN PARPOL

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Brahma Aryana mengusulkan pembenahan pembiayaan partai politik. Menurutnya, skema bantuan keuangan partai politik tidak hanya didasarkan pada jumlah kursi yang diperoleh, tetapi

juga mempertimbangkan kinerja partai.

“Ke depan, pembiayaan partai politik sebaiknya tidak hanya didasarkan pada jumlah kursi yang diperoleh, tetapi juga pada kinerja partai politik,” ujarnya.

Menurut Brahma, penilaian tersebut sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki indikator objektif

dalam mengevaluasi kinerja partai politik.

“Mungkin perlu dipikirkan pembentukan suatu badan independen yang bertugas mengevaluasi kinerja partai politik berdasarkan indikator yang objektif. Dengan demikian, kedaulatan rakyat tidak berhenti hanya pada hari pencoblosan,” katanya.

PERKUAT INDEPENDENSI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, Ida Budhiati, menyoroti perlunya memperkuat independensi lembaga penyelenggara pemilu dalam revisi UU Pemilu. Menurutnya, independensi penyelenggara tidak cukup bertumpu pada integritas

individu, tetapi harus dijaga melalui sistem kelembagaan yang kuat.

Ida menilai revisi UU Pemilu perlu mengevaluasi sedikitnya enam aspek, yakni struktur kelembagaan, tugas dan kewenangan, mekanisme pengisian jabatan, hubungan antarlembaga penyelenggara pemilu, akuntabilitas, serta sistem penganggaran. “Mekanisme penunjukan anggota DKPP masih kurang transparan dan belum memberikan ruang partisipasi publik yang memadai,” ujarnya.

Selain itu, Ida menilai akuntabilitas Bawaslu dan DKPP juga perlu diperkuat. Ia pun mengusulkan agar produk DKPP memiliki mekanisme pengujian yang jelas serta forum tripartit KPU, Bawaslu, dan DKPP diaktifkan kembali untuk memperkuat koordinasi antarlembaga penyelenggara pemilu.

IMUNITAS PENYELenggara

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Rendy NS Umboh, menyoroti wacana pemberian imunitas bagi penyelenggara pemilu. Ia mengingatkan agar perlindungan hukum tidak berubah menjadi kekebalan hukum. “Saya sepakat bahwa jangan sampai *immunity becomes impunity*. Artinya, niat baik memberikan imunitas justru berubah menjadi kekebalan terhadap hukum,” ujarnya.

Meski demikian, Rendy mengakui terdapat fenomena penyelenggara pemilu di daerah yang harus berhadapan dengan proses hukum setelah tahapan pemilu berakhir. Karena itu, menurutnya, penyelenggara yang menjalankan tugas sesuai kewenangannya harus terlindungi dari praktik kriminalisasi. (P-1)

Arahkan Revisi Perkuat Pencegahan Politik Uang

Pembentuk undang-undang perlu mengevaluasi desain pemilu sehingga mampu mencegah politik uang sejak tahap pencalonan.

REVISI Undang-Undang (UU) Pemilu dinilai perlu diarahkan tidak hanya pada perubahan norma, tetapi juga memperkuat pengawasan dan implementasi aturan guna menekan praktik politik uang. Selama ini politik uang kerap jadi pintu masuk korupsi setelah kandidat terpilih.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, Ida Budhiati menilai banyaknya kepala daerah yang belakangan terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi peringatan serius bagi pembentuk undang-undang untuk evaluasi desain pemilu sehingga mampu mencegah politik uang sejak tahap pencalonan.

“Karena itu muncul berbagai usulan, termasuk dari KPK, agar UU Pemilu didesain ulang untuk mencegah praktik politik uang yang pada akhirnya membebani kepala daerah setelah terpilih, baik secara moral

maupun dalam bentuk balas budi politik,” ujar Ida di Jakarta, kemarin.

Meski demikian, menurut mantan anggota KPU RI itu, akar persoalan bukan terletak pada kekurangan regulasi. Menurutnya, instrumen hukum yang mengatur pencegahan politik uang sebenarnya sudah cukup memadai. “Lalu di mana persoalannya? Menurut saya, persoalannya terletak pada aspek pengawasan dan implementasi aturan,” tegas Ida.

Ia mencontohkan, ketentuan soal pembatasan dana kampanye dan belanja kampanye telah diatur dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Namun, hingga kini KPU belum menemukan formula tepat untuk menentukan batas belanja kampanye yang realistis. “Yang menjadi PR adalah bagaimana KPU menyusun formula pembatasan belanja kampanye yang wajar,” ujarnya.

Ida pun mengusulkan agar revisi UU Pemilu juga memperkuat meka-

nisme audit dana kampanye. Audit tidak hanya berhenti pada pemeriksaan administrasi, tapi harus mampu menguji kesesuaian laporan dengan kondisi faktual di lapangan.

METODE KAMPANYE

Beberapa waktu sebelumnya, KPK pernah mengusulkan agar penerapan model-model kampanye berbiaya tinggi ditinjau kembali untuk mencegah terjadinya korupsi. KPK memandang pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan melalui penindakan setelah pelanggaran terjadi, tapi harus dibarengi dengan upaya pencegahan. “Pencegahan harus dimulai dari awal, yaitu dengan memperbaiki sistem kampanye, pembiayaan politik, dan penyelenggaraan pemilu,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Salah satunya yang mereka soroti ialah penerapan metode kampanye akbar atau rapat umum dalam proses pemilu dan pilkada yang sebaiknya diganti dengan pola kampanye yang lebih sederhana dan lebih efisien, seperti kampanye menggunakan platform digital.

“Dengan cara ini, persaingan politik tidak lagi didominasi kekuatan modal, melainkan oleh kualitas gagasan, program kerja, dan integritas para kandidat,” tukas Budi. (Dev/Ant/X-3)



BAHAS REMUNERASI KEPALA DAERAH: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) berbincang dengan Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat tersebut membahas remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematisasi dana bagi hasil, serta peningkatan pendapatan asli daerah.

MEDIA
INDONESIA
.COM

VIEWS
& NEWS

F
A
K
C
E
T

TIPUAN HOAKS BERTEBARAN

Sudahkah kenali pilihan Anda?

✓

Mediaindonesia.com
Hadir dengan opini cerdas dan terverifikasi.
Mudah diakses dan semua informasi berkualitas ada di genggaman Anda.

Setengah Hati Tangani Sampah

- Tidak ada toleransi membuang sampah ilegal yang merusak lingkungan.
- Pemprov DKI telah membebaskan lahan seluas 40 hektare di Tangerang.
- Seluruh warga diminta memilah sampah dari hunian masing-masing.

MOHAMAD FARHAN ZHUHRI
zhuhrif@mediaindonesia.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk membenahi persoalan sampah secara komprehensif dari hulu ke hilir. Itu mencakup dorongan pemilahan dari rumah tangga, optimalisasi fasilitas tempat pengolahan sampah, hingga penindakan hukum tegas bagi pihak yang melanggar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun mengingatkan seluruh jajaran pegawai, khususnya di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI, agar tidak bekerja setengah-setengah dalam menuntaskan persoalan sampah di Ibu Kota. “Salah satu problem kita adalah mengerjakan sesuatu secara setengah hati,” ujar Pramono di Jakarta, kemarin.

Pramono menjelaskan evaluasi dan rapat khusus mengenai pengelolaan sampah kini rutin digelar setiap pekan sejak penerbitan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.

Regulasi itu mewajibkan seluruh warga Jakarta memilah sampah langsung dari hunian masing-masing. “Karena persoalan sampah ini menjadi persoalan yang sangat serius,” ujarnya.

MENGUBAH PARADIGMA

Dengan total neraca sampah Jakarta yang mencapai sekitar 9.000 ton per hari, Pemprov DKI berupaya mengikis ketergantungan pada

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Fokus utama dialihkan ke optimalisasi tempat pengolahan sampah berkonsep *reduce, reuse, recycle* (TPS 3R). “Kalau dulu angkut, buang, sekarang menjadi pilah, angkut, olah. TPS 3R Menteng Atas (misalnya) dulunya hanya menjadi tempat penampungan sampah-sampah,” kata Pramono.

Menurutnya, pemanfaatan TPS 3R secara maksimal akan sangat efektif memotong volume sampah harian yang dikirim keluar Jakarta. “Kalau itu bisa dilakukan, mengurangi cukup signifikan jumlah sampah yang harus dikirim ke Bantargebang sampai menunggu pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di Jakarta,” katanya.

Saat ini, satu TPS 3R rata-rata mampu mengurangi beban sampah ke Bantargebang sebanyak 25–50 ton per hari. Contohnya TPS 3R Menteng Atas di Setiabudi, Jakarta Selatan. Melalui kolaborasi dengan pihak swasta, fasilitas itu mengolah sekitar 50 ton sampah per hari yang berasal dari permukiman warga serta sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka).

Dari total volume yang masuk, sebanyak 20%–30% diolah menjadi material *refuse derived fuel* (RDF). Bahan bakar alternatif tersebut kemudian dicampur kompos organik untuk diserap pabrik semen.

“RDF yang kapasitasnya bisa sampai dengan 150 ton walaupun sekarang ini satu sifnya baru 30 ton. Saya sudah meminta dikoor-dinasikan untuk bisa bekerja dua sif minimum. Kalau *three* sif, akan menjadi lebih baik.”

DAYA TAMPUNG

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi Asikin mengungkapkan, saat ini terdapat 31 TPS 3R yang tersebar di Ibu Kota. Namun, sebagian besar fasilitas itu belum beroperasi maksimal.

Pemprov DKI pun berencana mereplikasi konsep pengelolaan seperti di TPS 3R Menteng Atas dengan menggandeng pihak ketiga sehingga tiap TPS 3R kelak mampu mengolah hingga 100 ton sampah per hari. “Untuk tahun depan belum ada penambahan TPS 3R baru. Fokus kami mengoptimalkan yang sudah ada. Kalau seluruh 31 TPS 3R bisa berkapasitas 100 ton, totalnya bisa mencapai sekitar 3.000 ton per hari,” harap Dudi.

Di samping TPS 3R, Dudi menyoro-ti pentingnya penanganan sisa makanan (*food waste*) yang mendominasi hampir separuh dari total sampah harian Jakarta. Pengurangan *food waste* dari skala rumah tangga dan tempat usaha dinilai bakal berdampak signifikan terhadap daya tampung sistem pengelolaan sampah kota.

Selain itu, Pemprov DKI telah membebaskan lahan seluas 40 hektare di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten. Fasilitas itu disiapkan khusus untuk memproses sampah organik, melengkapi alur pengolahan anorganik, pembuatan RDF, hingga penanganan residu akhir.

TINDAK TEGAS PELANGGAR

Seiring dengan pembenahan fasilitas, Pemprov DKI Jakarta turut



MIA/AGUS MULYAWAN

WARGA JAKARTA WAJIB PILAH SAMPAH: Pengumuman pembatasan pembuangan sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dipasang pengurus lingkungan di Jalan Menteng Wadas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, kemarin. Pemprov DKI Jakarta menekankan seluruh warga untuk memilah sampah sebelum dibuang menjadi empat bagian, yaitu sampah mudah terurai, sampah residu, sampah daur ulang, dan sampah B3 rumah tangga. TPST Bantargebang mulai 1 Agustus 2026 hanya menerima sampah residu dari wilayah DKI Jakarta.

memperketat pengawasan terhadap badan usaha dan penyedia jasa angkut sampah.

Sanksi administratif dan uang paksa dijatuhkan kepada pihak-pihak yang kedapatan membuang sampah sembarangan atau melanggar prosedur resmi. “Penyedia jasa dan pelaku usaha wajib memastikan sampah diangkut, dikelola, dan dibuang melalui sistem yang resmi,” ucap Dudi.

Dudi memastikan Pemprov DKI tidak akan menoleransi praktik pembuangan sampah ilegal yang merusak lingkungan. Langkah hu-

kum itu diambil demi membangun tata kelola sampah kota yang tertib dan berkelanjutan. Langkah tegas tersebut diwujudkan melalui tindakan terhadap dua penyedia layanan angkut sampah yang terbukti melanggar aturan di kawasan Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara.

Menurut Kepala Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum DLH DKI Jakarta Helmy Zulhidayat, sanksi uang paksa sebesar Rp10 juta dijatuhkan kepada CV TBB setelah truk milik perusahaan tersebut tertangkap tangan membuang sampah secara liar di lokasi Hutan

Kota Penjaringan.

“Kendaraan pengangkut juga diamankan sebagai barang jaminan sampai kewajiban administratifnya dipenuhi,” terang Helmy.

Sanksi serupa menyasar PT FJM yang dijatuhi uang paksa sebesar Rp5 juta karena terbukti menjual sampah drum dan ember bekas ke lapak liar di area yang sama. Jika sanksi tidak dipenuhi atau pelanggaran berulang, Pemprov DKI siap mengambil tindakan paling keras, yaitu pencabutan izin usaha sesuai dengan Perda 3/2013 dan Pergub 102/2021. (Ant/P-2)

LENSABISNIS

PT Pegadaian (Persero) Resmi Terima SK Perjanjian Kerja Bersama Periode 2026–2028 dari Kemenaker RI

PT Pegadaian (Persero) secara resmi memasuki babak baru dalam pengelolaan hubungan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Pegadaian Periode 2026–2028 oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kepada manajemen PT Pegadaian (Persero), pada Rabu (29/07). Acara penyerahan SK PKB periode 2026–2028 ini dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersama jajaran pejabat tinggi Kemenaker, di antaranya Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan bidang Hubungan Industrial, dialog sosial dengan serikat buruh, kebijakan pengupahan, serta pengawasan ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3), Indra, serta Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan di Kementerian Ketenagakerjaan, Dhatun Kuswandari. Selain Tim Perunding yang terdiri dari gabungan unsur Manajemen dan Serikat Pekerja PT Pegadaian (Persero), turut hadir pada kegiatan tersebut jajaran pimpinan Serikat Pekerja dari berbagai BUMN, termasuk Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN, FSP Pertamina Bersatu, FSP Perkeretaapian, SP PLN, SP Bank Mandiri, SP Kimia Farma Apotek, SP Bank BRI, SP Jasa Raharja, hingga Sekar Telkom. Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Damar Latri Setiawan mengungkapkan, adanya SK PKB ini menjadi wujud nyata kesepakatan resmi antara manajemen dan SP Pegadaian untuk mewujudkan iklim kerja yang kondusif dan dinamis. “Dengan diberlakukannya SK PKB ini menjadi penanda berlakunya landasan hukum dan aturan baru ketenagakerjaan di lingkungan Pegadaian untuk tiga tahun ke depan. Pengesahan SK ini juga menjadi wujud nyata kesepakatan resmi antara manajemen dan Serikat Pekerja Pegadaian, yang harapannya dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif, dinamis, serta memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi seluruh insan Pegadaian di seluruh Indonesia,” ujar Damar. (RO)



DOK PEGADAIAN

WORLD CLASS AUTO SHOW SERIES

GIIAS

30 JULY 09 AUGUST 2026

ICE - BSD CITY

MORE BRANDS

65+ AUTOMOTIVE BRANDS

MORE TECHNOLOGIES

150+ AUTOMOTIVE SUPPORTING INDUSTRY BRANDS

scan for more information

MEDIA PARTNER

MEDIA INDONESIA

#GIIAS2026

Indonesiaautoshow.com

7

@OICA

PENGUMUMAN

Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT SUMBER LAUT UTAMA AMBON, berkedudukan di Kota Ambon ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan menurunkan modal dasar Perseroan dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan menurunkan modal ditempatkan/disorot perseroan dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Bagi mereka yang merasa berkepentingan dan berkeberatan atas penurunan modal dasar perseroan dan penurunan modal ditempatkan/disorot perseroan tersebut, harap segera menghubungi Penanggung Jawab Perseroan di kantor Perseroan nomor telepon 0811740375 pada setiap hari jam kerja, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian Pengumuman ini harap dimaklumi.

Pemegang Saham Perseroan.

PENGUMUMAN

Diumumkan kepada seluruh anggota koperasi, masyarakat dan pihak yang berkepentingan dengan Koperasi Karyawan A. Latief Corporation, bahwa koperasi akan dibubarkan berdasarkan keputusan rapat anggota. Apabila ada pihak yang berkeberatan, dan berkepentingan terhadap koperasi agar segera melakukan koordinasi kepada pengurus koperasi sebelum dilaksanakan rapat. Informasi lebih lanjut terkait rencana pembubaran koperasi dapat menghubungi IBU MARIA (0819898958) atau datang langsung ke Kantor Koperasi di Jl. Iskandar II No.2, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, setiap hari kerja pukul 09.00 s/d 17.00.

Jakarta, 31 Juli 2026

Ketua

KOPERASI KARYAWAN A. LATIEF CORPORATION

JAS Airport Services

LAPORAN KEUANGAN PT JASA ANGKASA SEMESTA Tbk

Menara Cardig, Jl Raya Halim Perdanakusuma Jakarta 13650 Phone : (021) 5591 2988 Fax : (021) 5695 6665

LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 30 JUNI 2026 DAN 31 DESEMBER 2025 (DALAM JUTAAN RUPIAH)					
ASET	30 JUNI 2026 Rp	31 DESEMBER 2025 Rp	LIABILITAS DAN EKUITAS		
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Kas dan setara kas	561.008	933.111	Utang usaha	68.072	54.059
Piutang usaha			Pihak ketiga	28.209	24.357
Pihak beresali	306.127	272.930	Utang pajak	25.675	53.691
Piutang lain-lain	45.670	44.412	Liabilitas kontrak	21.533	22.534
Pihak ketiga	-	1.155	Beban akrual	239.883	302.986
Persediaan	25.359	20.992	Utang lain-lain	292	598
Biaya dibayar di Muka	23.481	12.800	Bagian jangka pendek atas:		
Utang muka pemasok	5.806	5.261	Liabilitas sewa	52.391	56.345
Aset lancar lainnya	9.067	37.494	Liabilitas imbalan kerja	26.440	44.038
Total Aset Lancar	976.517	1.328.155	Total Liabilitas Jangka Pendek	462.494	558.608
ASET TIDAK LANCAR			LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Investasi pada instrumen utang	60.632	60.152	Bagian jangka panjang atas:		
Aset tetap	335.197	345.908	Liabilitas sewa	32.998	32.998
Aset hak-guna	81.588	85.436	Liabilitas imbalan kerja	94.161	84.562
Aset pajak tangguhan	7.568	27.033	Total Liabilitas Jangka Panjang	127.158	117.560
Aset tidak lancar lainnya	40.964	40.970	Total Liabilitas	589.653	676.168
Total Aset Tidak Lancar	525.950	559.499	EKUITAS		
TOTAL ASET	1.502.467	1.887.654	Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham		
			Modal dasar - 800 juta saham	51.584	51.584
			Modal ditempatkan dan disorot penuh - 515.670.753 saham	(1.658)	(1.493)
			Saham treasury	33.420	33.420
			Tambahan modal disorot	(38.453)	(43.645)
			Rugi komprehensif lain		
			Saldo laba	10.317	10.317
			Cadangan umum	857.605	1.161.303
			Belum ditentukan penggunaannya	912.815	1.211.486
			Total Ekuitas		
			TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.502.467	1.887.654

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2026 DAN 2025 (DALAM JUTAAN RUPIAH)		
	30 JUNI 2026 Rp	30 JUNI 2025 Rp
PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN	1.292.897	1.204.725
BEBAN USAHA	(889.212)	(849.125)
LABA USAHA	403.685	355.600
Penghasilan keuangan	16.244	19.125
Beban keuangan	(5.339)	(1.840)
Labai(rugi) selisih kurs	26.409	660
Pendapatan operasi lain	273	(5)
Beban operasi lain	(179)	(5)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	441.092	367.224
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(93.649)	(76.599)
LABA PERIODE BERJALAN	347.443	290.625
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak	5.192	5.847
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	352.635	296.472
Labai per saham dasar (angka penuh)	673.34	574.56

LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2026 DAN 2025 (DALAM JUTAAN RUPIAH)		
	30 JUNI 2026 Rp	30 JUNI 2025 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pendapatan dari pelanggan	1.254.984	1.145.064
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(894.376)	(847.420)
Penerimaan penghasilan bunga	16.244	19.125
Pembayaran bunga	(5.339)	(1.564)
Pembayaran pajak penghasilan	(68.008)	(57.265)
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	393.505	287.940
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan pengembalian pinjaman dari pihak beresali	1.364	3.752
Pendanaan aset tetap	(22.208)	(27.491)
Hasil pelepasan aset tetap	129	(23.739)
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(20.715)	(23.739)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran liabilitas sewa	(35.625)	(26.600)
Pembayaran dividen kas	(651.141)	(459.979)
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(686.766)	(486.579)
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(403.976)	(252.377)
DAMPAK NETO PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS	31.873	(756)
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	933.111	840.251
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	561.008	587.118

Jakarta, 31 Juli 2026

PT JASA ANGKASA SEMESTA Tbk

DIREKSI

Soft Power Beasiswa Turki dan Mendesain Ulang LPDP

PENGANTAR:

MULAI 20 Maret 2021, tulisan di halaman Opini yang terbit setiap Jumat merupakan sinergi antara *Media Indonesia* dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Lintas Negara. PCINU Lintas Negara ialah forum silaturahmi, berbagi informasi, dan gagasan antar-PCINU di bawah koordinasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di lebih dari 30 negara di dunia. PCINU menyatukan diaspora santri dengan berbagai latar belakang, seperti kiai, akademisi, praktisi, wirausaha, diplomat, pekerja profesional, dan pejabat pemerintah. Sinergi ini sekaligus wujud peran media mendukung PCINU menyebarkan misi diplomasi Islam *wasatiah* atau Islam moderat untuk perdamaian dunia.



DOK PRIBADI

BUDY SUGANDI

Kepala Buperta Pramuka, Ketua Umum Forum Alumni PPI Turki

SEPANJANG perjalanan sembari melihat gumpalan awan putih, bentangan bumi, serta hamparan langit luas di balik jendela pesawat, pikiran saya ikut terbang pada satu pertanyaan sederhana, tetapi mengganggu. Mengapa sebuah negara yang secara ekonomi tidak jauh lebih kaya daripada Indonesia, bahkan pernah dilanda krisis mata uang dan inflasi yang menggerus daya beli rakyatnya, bisa begitu konsisten dan sabar dalam merancang program yang hasilnya baru bisa dipanen satu, dua, bahkan tiga dekade kemudian? Jawabannya, saya kira, terletak pada cara pandang. Turki tidak melihat beasiswa sebagai belanja sosial semata, melainkan juga sebagai investasi geopolitik jangka panjang. Turki menganggap memberikan beasiswa sama pentingnya dengan investasi di sektor pertahanan atau infrastruktur energi. Pagi itu, di Bandar Udara Esenboga Ankara saya kembali menginjakkan kaki di negeri dua benua dan warisan Kesultanan Utsmaniyah, setelah pertama kali datang pada 2011 untuk menempuh studi master dengan beasiswa dari pemerintah Turki/Turkiye Burslari. Kehadiran saya kali ini dalam rangka memenuhi undangan pemerintah Turki menerima Alumni Award 2026 sekaligus wisuda mahasiswa internasional penerima YTB Turkiye Burslari. Acara seremoni dihadiri Wakil Presiden Turki Cevdet Yilmaz, menteri, Presiden YTB, para duta besar, dan wisudawan. Tahun ini ada tujuh kategori penerima anugerah alumnus berprestasi. Pertama, kategori kehormatan seumur hidup diraih Prof Dr Tadashi Suzuki (Jepang); kedua, kategori ekonomi dan kewirausahaan diraih Budy Sugandi (Indonesia); ketiga, kategori media dan komunikasi diraih Lamis Alsoradi (Palestina); keempat, kategori budaya dan seni diraih Prof Dr Halid Tadmori (Libanon); kelima, kategori akademik dan penelitian ilmiah diraih Prof Dr Ali Ovgun (Siprus); keenam, kategori kontribusi terhadap hubungan internasional diraih Abdulkadir Mohamed Nur (Somalia), dan ketujuh, kategori penghargaan kesetiaan diraih Jenderal Dr Amran Amir Hamzah (Malaysia). Bagi saya, penghargaan itu menjadi energi tambahan untuk terus belajar, berbakti, dan terus berproses menjadi

manusia profesional.

Ada satu momen yang membekas ketika nama saya dipanggil naik ke podium untuk menerima penghargaan. Di ruangan itu berkumpul lulusan Turkiye Burslari dari puluhan negara; Eropa, Afrika, Asia Tengah, Balkan, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara. Saat diberi piala dan kesempatan pidato, saya menyadari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar prestasi pribadi, saya sedang berdiri di tengah hasil panen dari sebuah investasi jangka panjang yang dirancang dengan sangat sabar dan rapi oleh sebuah negara. Melalui beasiswa Turkiye Burslari, negara itu tidak sekadar memberi beasiswa, tetapi juga menyemai pemimpin-pemimpin masa depan.

Pengalaman itulah yang mendorong saya mengajak kita, Indonesia, melihat cermati. Di balik gegap gempita program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang kita banggakan, ada pelajaran penting yang bisa dipetik dari cara Turki merancang, mengelola, dan memetik hasil dari program beasiswa internasional mereka, Turkiye Burslari.

AMBISI YANG DIBANGUN DI ATAS ANGKA

Turkiye Burslari lahir pada 2012, di bawah kendali Presidency for Turks Abroad and Related Communities/Yurtdisi Turkler ve Akabra Topluluklar Baskanligi (YTB). Programnya sederhana dalam konsep, tetapi raksasa dalam skala, yaitu memberikan beasiswa penuh kepada mahasiswa asing yang meliputi biaya kuliah, biaya hidup, tempat tinggal, asuransi kesehatan, tiket pesawat pulang-pergi, bahkan kursus bahasa Turki gratis selama satu tahun kepada pelajar dari seluruh dunia, tanpa memandang kewarganegaraan.

Skalanya terus membesar setiap tahun. Pada 2025, lebih dari 120 ribu pelamar dari sekitar 170 negara memperebutkan sekitar 5.000 kursi beasiswa, meningkatkan tingkat penerimaannya berada di kisaran 2%-5%, setara dengan ketatnya seleksi masuk universitas elite dunia. Total jaringan alumnus Turkiye Burslari kini melampaui 150 ribu orang yang tersebar di lebih dari 160 negara, banyak di antara mereka menduduki posisi kepemimpinan di pemerintahan, dunia akademik, dan sektor swasta di negara asal mereka. Ambisi Turki tidak berhenti di situ.

Pemerintah menargetkan jumlah mahasiswa asing di Turki mencapai 500 ribu orang pada 2028, melonjak drastis dari sekitar 340 ribu pada 2024-2025. Data itu membawa Turki menjadi negara nomor delapan dengan mahasiswa asing terbanyak di dunia.

Yang menarik bukan hanya soal angka, melainkan juga filosofi di baliknya. Turkiye Burslari dirancang sebagai instrumen *soft power*, cara Turki memperluas pengaruh, membangun jaringan diplomatik informal, dan menanamkan citra positif negara mereka di benak generasi pemimpin masa depan dari berbagai belahan dunia. Setiap penerima beasiswa diperlakukan bukan sekadar sebagai mahasiswa, melainkan juga sebagai calon duta bangsa Turki di negara mereka sendiri. Karena itu, YTB tak pernah berhenti merawat hubungan dengan para alumnus mereka lewat jaringan alumnus global, forum tahunan, hingga undangan kembali ke Turki untuk berbagai kegiatan kebudayaan dan diplomasi publik.

Ada satu detail kecil yang menurut saya justru paling mengharukan, seluruh penerima mahasiswa asing, dari negara mana pun asalnya, diwajibkan mengikuti kursus bahasa Turki selama satu tahun sebelum memulai studi. Sepintas itu terlihat seperti

kebijakan teknis biasa. Namun, sesungguhnya itulah inti strategi Turki memastikan setiap mahasiswa asing benar-benar menyerap budaya, cara berpikir, dan nilai-nilai Turki sebelum mereka larut dalam disiplin ilmu masing-masing. Ketika kelak mereka pulang bertahun-tahun kemudian, yang mereka bawa bukan hanya ijazah, melainkan juga kefasihan berbahasa, jejaring pertemanan, dan kedekatan emosional dengan Turki yang sulit dihapus waktu.

LPDP: PRESTASI BESAR YANG SEDANG DIUJI

Bandingkan dengan LPDP, yang lahir setahun lebih dulu dari Turkiye Burslari, pada 2013. LPDP ialah salah satu eksperimen kebijakan pendidikan paling ambisius yang pernah dilakukan Indonesia. Lembaga itu mengelola dana abadi pendidikan yang bersumber dari APBN dan hasil investasinya untuk membiayai studi lanjut putra-putri terbaik bangsa. Sampai akhir 2025, dana abadi yang dikelola LPDP telah mencapai sekitar Rp154 triliun, bahkan disuntik tambahan Rp25 triliun sehingga totalnya menembus Rp180 triliun pada awal 2026. Sejak berdiri, LPDP tercatat telah memberikan kesempatan kepada lebih dari 58 ribu penerima

manfaat.

Itu pencapaian yang layak dibanggakan. Namun, jika kita jujur membaca tren terbaru, ada tanda-tanda yang patut menjadi renungan bersama. Pada 2025, jumlah pendaftar LPDP melonjak signifikan menjadi hampir 79 ribu orang, naik sekitar 33% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, jumlah penerima beasiswa justru dipangkas hampir separuh, dari sekitar 8.600 orang pada 2024 menjadi sekitar 4.300 orang pada 2025. Penurunan itu paling terasa pada penerima beasiswa tujuan luar negeri, yang jumlahnya susut sekitar 48% dalam setahun.

Di sinilah letak kontras yang paling tajam di antara kedua program itu. Turkiye Burslari dirancang sebagai program yang menarik dunia untuk datang ke Turki (*brain gain*), investasi yang hasilnya kembali ke Turki dalam bentuk mahasiswa asing yang membayar biaya hidup di sana, memperkuat ekosistem kampus, riset, dan pariwisata pendidikan, sekaligus membangun jejaring pengaruh Turki di negara asal mereka setelah lulus. LPDP dirancang sebaliknya, mengirim putra-putri Indonesia ke luar negeri (*brain circulation*), dengan harapan mereka pulang membawa ilmu untuk membangun negeri. Keduanya sah dan punya tujuan strategis masing-masing. Namun, Turkiye Burslari punya satu keunggulan struktural yang tidak dimiliki LPDP, yaitu pengaruh global bagi Turki bahkan sebelum mahasiswa wylulus, sementara manfaat LPDP baru terasa penuh setelah para alumnus mereka kembali dan berkarya di Indonesia.

PELAJARAN YANG BISA DIPETIK

Soal keberlanjutan pendanaan yang dirancang untuk krisis, bukan hanya masa jaya. LPDP kini mengalami apa yang oleh pengelolanya sendiri disebut tekanan defisit operasional karena belanja tumbuh lebih cepat daripada pendapatan investasi dana abadi sejak 2023-2024. Itu bukan aib, melainkan sinyal bahwa desain keuangan program perlu terus disempurnakan agar tidak bergantung pada satu sumber pendapatan investasi yang fluktuatif. Turkiye Burslari relatif lebih stabil karena dibiayai langsung oleh APBN Turki sebagai instrumen diplomasi negara, bukan murni dana abadi yang harus menghasilkan imbal hasil investasi setiap tahun.

Berikutnya soal arah program. Selama ini kita terlalu fokus mengirim anak bangsa keluar negeri, padahal Indonesia punya modal besar untuk menjadi pusat pendidikan tinggi regional. Indonesia memiliki populasi usia muda terbesar di Asia Tenggara, biaya hidup kompetitif, kekayaan budaya, dan posisi strategis di jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Turki membuktikan bahwa sebuah negara berkembang dapat mengubah dirinya menjadi destinasi pendidikan global dalam waktu kurang dari satu dekade,

dari 48 ribu mahasiswa asing pada 2013 menjadi hampir 340 ribu pada 2024-2025. Mengapa Indonesia, dengan lebih dari 4.000 perguruan tinggi, tidak merancang program setara 'Beasiswa Nusantara' yang secara sengaja mengundang pelajar dari Afrika, Asia Selatan, dan Pasifik untuk belajar di sini sambil membangun pengaruh diplomatik dan ekonomi jangka panjang Indonesia di kawasan-kawasan itu?

Terakhir soal jaringan alumnus sebagai aset strategis negara, bukan sekadar formalitas ikatan dinas. Turkiye Burslari merawat 150 ribu alumnusnya di 160 lebih negara melalui portal digital, forum tahunan, dan program keterlibatan berkelanjutan yang menjadikan mereka mitra jangka panjang, bukan sekadar mantan penerima beasiswa. LPDP sejauh ini masih terlalu berfokus pada kewajiban administratif pascastudi ketimbang membangun ekosistem alumnus yang hidup, saling terhubung, dan aktif menjadi kekuatan lunak Indonesia di panggung global. Padahal para alumnus LPDP yang tersebar di berbagai negara dan sektor ialah aset diplomasi publik yang belum dioptimalkan.

Penghargaan yang diberikan pemerintah Turki kepada para alumnus bukan sekadar pengakuan atas perjalanan profesional mereka. Itu bukti hidup bahwa investasi pendidikan lintas negara, jika dirancang dengan visi jangka panjang dan dirawat dengan konsisten, dapat melahirkan pemimpin-

pemimpin yang membawa nama baik negara pemberi beasiswa ke mana pun mereka melangkah. Mereka membawa nama Turki dalam setiap pencapaian mereka.

Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, kapan Indonesia tidak hanya mengirim anak-anak terbaiknya ke luar negeri, tetapi juga mulai membangun sistem yang juga mengundang dunia untuk datang dan belajar dari kita. Kehadiran mahasiswa internasional juga membawa atmosfer akademik dan riset yang tinggi.

Turki telah menunjukkan jalannya. Modal dasar kita bahkan lebih besar. Yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk merancang ulang visi, bukan sekadar mengelola anggaran yang ada. Pada akhirnya, sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa banyak ia mengirim pelajarannya ke luar negeri, tetapi dari seberapa besar dunia ingin datang dan belajar darinya.

Ketika saya menerima penghargaan itu di atas panggung, yang terlintas di benak saya bukan hanya rasa syukur pribadi, melainkan juga bayangan tentang mahasiswa-mahasiswa Indonesia selanjutnya yang berdiri di panggung serupa, bukan sekadar penerima beasiswa, melainkan juga sebagai wakil dari Indonesia. Itu bukan mimpi yang mustahil. Yang tersisa hanyalah keberanian untuk mulai menuliskan babak baru itu dan tidak ada waktu yang lebih tepat untuk memulainya selain sekarang.

PENGUMUMAN KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM PT BIMA SARANA PERKASA

Direksi PT BIMA SARANA PERKASA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 31 Juli 2026, Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui penerbitan 38.282.775 (tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) saham baru yang akan diambil bagian oleh MEA Commercial Holdings Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Singapura ("MEACH"), sebagai pelaksanaan konversi atas tagihan MEACH terhadap Perseroan, yang terdiri atas utang Perseroan kepada MEACH yang telah ada dan yang akan diperoleh dengan total keseluruhan sebesar Rp153.159.073.943 (seratus lima puluh tiga miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga Rupiah).

Demikianlah pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

PT BIMA SARANA PERKASA
Palm Court
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 26-27, Jakarta Selatan
Untuk perhatian: Direksi
Jakarta, 31 Juli 2026
Direksi PT BIMA SARANA PERKASA



AGENDA | JUMAT, 31 JULI 2026

TOP NEWS | 20.05 WIB

Program berita Metro TV hadir sepanjang hari untuk memastikan Anda tidak tertinggal satu pun informasi. Menyajikan rangkaian berita pilihan dari dalam hingga luar negeri yang dikemas secara terperinci. Salah satu yang spesial dan berbeda dari kami adalah *Top News*. Serangkaian berita pilihan kami suguhan untuk memperkaya wawasan Anda. Jangan lewatkan kehadirannya.

TOP NEWS

METRO XIN WEN | 22.05 WIB

Metro Xinwen merupakan program berita berbahasa Mandarin pertama di Indonesia. Seiring dengan perjalanan Metro TV, Metro Xinwen semakin memperluas isi berita dengan melingkupi berita-berita besar dari dalam negeri. Metro Xinwen juga berisi tayangan berita yang berhubungan dengan masyarakat Tionghoa di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Jangan lewatkan kehadiran Metro Xinwen, hanya di Metro TV.

美都新闻
Metro Xinwen

Kemarau Panjang, Serangan Nyamuk Mengganas

- Peningkatan populasi nyamuk diduga berkaitan dengan kondisi cuaca ekstrem akibat El Nino.
- Kemarau panjang juga memperluas krisis air bersih di berbagai wilayah.
- Sebagian petani di Kabupaten Pidie, Aceh, justru mengubah strategi budi daya.

KRISTIADI
kristiadi@mediaindonesia.com

MUSIM kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino tidak hanya menimbulkan kekeringan di sejumlah daerah, tapi juga memicu peningkatan serangan nyamuk. Pemerintah daerah pun mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi demam berdarah dengue (DBD).

Di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, warga mengeluhkan serangan nyamuk yang meningkat sejak April 2026. Nyamuk muncul dalam jumlah besar pada siang maupun malam hari sehingga memicu kekawatiran terhadap penyebaran DBD.

Warga Sambongpari, Kecamatan Mangkubumi, Toto Sontani, 55, mengatakan keluarganya harus membeli berbagai jenis obat nyamuk untuk mengurangi gangguan tersebut.

“Serangan nyamuk dalam jumlah besar terjadi sejak awal April. Kebutuhan obat nyamuk menjadi sangat penting sebagai antisipasi terhadap nyamuk *Aedes aegypti* dan jenis nyamuk lainnya,” kata Toto, kemarin.

Menurut dia, keluarga telah mencoba berbagai merek obat nyamuk semprot maupun bakar dengan harga Rp10 ribu hingga Rp35 ribu per kemasan. Meski demikian, serangan nyamuk masih terus terjadi setiap malam. “Kami sudah mencoba berbagai merek obat nyamuk, tetapi nyamuk tetap banyak dan mengganggu saat tidur,” ujarnya.

TETAP WASPADA

Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candranegara mengakui fenomena serupa juga terjadi di rumahnya dan lingkungan sekitar. Ia menduga peningkatan populasi nyamuk berkaitan dengan kondisi cuaca ekstrem akibat El Nino.

“Kami mengimbau masyarakat tetap waspada dengan rutin melakukan gerakan 3M, memberantas sarang nyamuk, serta menjaga kebersihan lingkungan agar risiko DBD dapat ditekan,” katanya.

KRISIS AIR BERSIH

Selain memicu peningkatan populasi nyamuk, kemarau panjang juga memperluas krisis air bersih di berbagai wilayah. Di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, kekeringan telah melanda 22 desa di 12 kecamatan. Sebanyak 20.098 jiwa atau 6.319 kepala keluarga terdampak kesulitan memperoleh air bersih.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap, Taryo, mengatakan pemerintah bersama berbagai pihak terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Purwono menyebutkan lebih dari 128 tangki air bersih telah disalurkan kepada warga.

Di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mendistribusikan 25 ribu liter air bersih kepada warga Dusun Walangkopo, Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sari-rejo. Pemerintah daerah juga berencana mengeruk waduk

desa untuk meningkatkan kapasitas tampungan air dan mengurangi dampak keke-
ringan.

TANAM BAWANG MERAH

Di tengah ancaman keke-
ringan, sebagian petani di Kabupaten Pidie, Aceh, justru mengubah strategi budi daya. Sejak sebulan terakhir, mereka beralih dari menanam padi ke bawang merah yang dinilai lebih tahan terhadap kondisi minim air dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Luas tanam bawang merah di Kecamatan Simpang Tiga

meningkat dari sekitar 50 hektare menjadi 200 hektare. Petani menilai bawang merah hanya membutuhkan penyiraman satu hingga dua kali sehari sehingga lebih sesuai ditanam pada musim kemarau panjang.

“Karena krisis air irigasi, petani di sini lebih suka menanam bawang merah saat musim kemarau. Apalagi di sini kawasan pesisir. Hasil produksi bawang merah cukup menjanjikan,” tutur Mustamar Arifin, Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Simpang Tiga, Pidie. (LD/AT/YK/MR/E-2)



ANTARA FOTO/AKRAMUL MUSLIM

ADAPTASI KEMARAU: Petani memeriksa mesin pompa yang digunakan untuk mengalirkan air dari saluran Waduk Keliling Indrapuri ke lahan persawahan di Desa Lamanah Tunong, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Rabu (29/7). Pemanfaatan air dari saluran Waduk Keliling Indrapuri melalui mesin pompa menjadi salah satu upaya petani beradaptasi menghadapi musim kemarau akibat dampak El Nino guna menjaga ketersediaan air irigasi serta mempertahankan produktivitas lahan pertanian.

	PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA ABB, SOLUSI TEPAT MENCATASI RISIKO	LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2025 dan 2024 Kantor Pusat : Jl. Paletahan No.5 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Telp : (62-21) 7204021 - 23, 7204025 - 26 Fax : (62-21) 7222253, 7203306		
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)		LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN
A S E T		URAIAN	URAIAN	URAIAN
20252024		20252024	20252024	20252024
I ASET		LABA (RUGI)	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	PEMEMUHAN TINGKAT SOLVABILITAS
1 Kas dan Setara Kas9.805,0610.923,10		1 Pendapatan Jasa Asuransi148.315,54188.420,95	1 Perubahan Pendapatan Komprehensif Lainnya	A. Tingkat Solvabilitas
2 Investasi61.440,0485.162,25		2 Beban Jasa Asuransi48.606,22(16.279,79)	2 Investasi Ekuitas pada FVOCI - perubahan bersih579,32	a. Aset Yang Diperkenankan234.905,48243.513,58
3 Aset Investasi Kontrak PAYDI-		3 Pendapatan (Beban) dari Kontrak Reasuransi Milikan(50.608,19)(159.770,98)	3 Investasi Surat Utang pada FVOCI - perubahan bersih-	b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)190.271,47178.804,20
4 Aset Kontrak Asuransi39.635,1741.922,73		4 Hasil Jasa Asuransi Bersih49.101,1344.929,77	4 Pendapatan (beban) dari kontrak asuransi - bersih(3.490,41)(739,56)	c. Jumlah Tingkat Solvabilitas44.634,0264.709,38
5 Aset Kontrak Reasuransi180.676,53189.852,75		5 Pendapatan Investasi (termasuk PAYDI)5.056,664.734,69	5 Pendapatan (beban) dari kontrak reasuransi milikan - bersih187,00827,66	B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)
6 Aset Pajak Tangguhan6.977,556.829,68		6 Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Direalisasikan dan Belum Direalisasikan-	6 Penambahan (Pengurangan) Lainnya40.370,3368,66	a. Risiko Kredit4.481,845.328,20
7 Aset Lainnya101.028,4162.478,08		8 Pendapatan (Beban) Keuangan dari Kontrak Asuransi(7.669,23)(9.500,14)	7 Total37.646,24156,76	b. Risiko Likuiditas-
8 Jumlah Aset399.562,77397.168,60		9 Pendapatan (Beban) Keuangan dari Kontrak Reasuransi5.072,276.528,12	REASURADUR UTAMA	c. Risiko Pasar4.966,154.804,64
II LIABILITAS DAN EKUITAS		10 Hasil Akuisisi & Investasi Bersih2.459,901.762,66	NAMA REASURADUR%	d. Risiko Asuransi10.333,7311.947,98
9 Liabilitas Kontrak Asuransi248.511,25278.605,74		11 Beban Akuisisi & Komisi - Non Attributable-	REASURADUR DALAM NEGERI	e. Risiko Operasional349,60435,81
10 Liabilitas Kontrak Reasuransi29.604,9250.795,77		12 Beban Umum & Administrasi35.137,7943.773,64	1 PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)30,00%	C. Kelebihan (Kekurangan) Tingkat Solvabilitas24.502,7042.194,75
11 Liabilitas Kontrak PAYDI-		13 Pendapatan (Beban) Lainnya142,08207,04	2 PT Reasuransi Nusantara Makmur30,00%	D. Rasio Pencapaian (%)*221,71%287,41%
12 Liabilitas Pajak Tangguhan-		14 Laba Sebelum Pajak16.565,323.125,83	3 PT Asuransi Bangun Askrida7,00%	RASIO SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS
13 Liabilitas Lainnya17.976,9918.597,89		15 Beban Pajak135,43411,95	4 PT Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk6,00%	a. Rasio Kecukupan Investasi (%)260,80%125,40%
14 Modal Disetor54.300,0054.300,00		16 Laba Setelah Pajak16.429,892.713,87	5 PT Asuransi Sinarmas4,00%	b. Rasio Likuiditas (%)178,35%199,64%
15 Akumulasi Laba Ditahan(16.894,01)(33.636,27)		17 Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya - Bersih37.646,24156,76	6 PT Asuransi Jasarahajira Putera4,00%	c. CSM Growth: CSM setelah release/total CSM awal66,69%92,20%
16 Akumulasi Other Comprehensive Income (OCI)66.063,6128.505,48		18 Laba Komprehensif54.076,132.870,64	7 PT Asuransi Staco Mandiri4,00%	d. CSM Release: CSM yang direlease tahun berjalan/total CSM awal35,00%28,36%
17 Jumlah Liabilitas dan Ekuitas399.562,77397.168,60			8 PT Asuransi Binagriya Upakara4,00%	e. Perubahan RA: RA tahun ini/total RA tahun lalu80,11%137,76%
			9 PT PLN Insurance3,00%	f. Loss component weight: Loss component/ Insurance contract liabilities0,01%0,02%
			10 PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 19672,50%	
			11 PT Tugu Pratama Indonesia2,00%	
			12 PT Asuransi Eka Llyod1,50%	
			13 PT Asuransi Jasatania1,00%	
			14 PT Asuransi Asel Indonesia1,00%	
			JUMLAH100,0%	
			15 REASURADUR LUAR NEGERI0,00%	
			JUMLAH100,00%	
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI		PEMILIK PERUSAHAAN		
DEWAN KOMISARIS		1 Yayasan Brata Bhakti58,90%		
1 Komisaris Utama: Drs. Hasyim Irianto, SH, QRGP		2 Yayasan Kesejahteraan Masyarakat PT. Asuransi Jasa Indonesia18,04%		
2 Komisaris Independen: DR. Drs. Eddy Rasydin, MH, QRGP		3 Dana Pensiun PT. Asuransi Jasa Indonesia8,20%		
3 Komisaris Independen: Idham Tarnizi, SE, QRGP		4 PT. Tansa Trisna7,12%		
DIREKSI		5 Drs. H. A. Fauzi Achmad, MBA, AAIK3,96%		
1 Direktur Utama: Drs. Rafli, SH, MH, QRGP		6 Budhi Satria Budiman, SH1,23%		
2 Direktur Pemasaran Khusus: Drs. Eko Sukriyanto, QRGP		7 Soekono Wahjoe1,09%		
3 Direktur Pemasaran Umum: Heru Wibowo, S.Si, Apt, ANZIIIF(Assoc) CIP, CRGP		8 Dr. Indra Darmawan1,09%		
4 Direktur Teknik: Dedy Syofar, SE, Msi, ACII,AAAIK,AIIS, QRGP		9 PT. Putra Sinar Segara0,37%		
5 Direktur Keuangan & Administrasi: Drs. Iman Sumantri, M.Si, QRGP		JUMLAH100,00%		
Catatan : a. Diaudit oleh Akuntan Publik : Marzuki, M.Ak, CA, CPA,CFI, dengan opini "WAJAR" b. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif berdasarkan SAK (Audited) c. Kurs pada tanggal 31 Desember 2025, 1 US \$: Rp.16.782,- Kurs pada tanggal 31 Desember 2024, 1 US \$: Rp.16.612,-				
Jakarta, 31 Juli 2026 PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA DIREKTUR UTAMA  DRS. RAFLI, SH, MH, QRGP				

Infantino Ultimatum 211 Federasi

- FIFA memberi tenggat kepada asosiasi anggota untuk menyetujui pembentukan FIFA Forward Enterprise (FFE).
- Infantino menyebut FFE bertujuan mengoptimalkan nilai komersial turnamen FIFA.
- UEFA menjadi pihak paling keras menentang proposal tersebut hingga membahas opsi boikot.

DHIKA KUSUMA WINATA
dhika@mediaindonesia.com

PRESIDEN FIFA Gianni Infantino memberikan tenggat hingga 19 September 2026 kepada 211 asosiasi anggota FIFA untuk menentukan sikap terhadap rencana pembentukan FIFA Forward Enterprise (FFE), perusahaan komersial baru yang akan mengelola hak

bisnis berbagai turnamen FIFA, termasuk Piala Dunia. Proposal tersebut disertai tawaran pendanaan hingga US\$40 juta bagi setiap federasi apabila memperoleh persetujuan mayoritas anggota.

Sebaliknya, apabila usul itu gagal disahkan, FIFA menyatakan hanya akan melanjutkan program FIFA Forward yang sudah ada dengan total pendanaan sekitar US\$2,7 miliar, jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan skema baru yang ditawarkan.

Menurut laporan *The Times*, ultimatum tersebut tertuang dalam surat yang dikirim Infantino kepada seluruh anggota FIFA. Dalam surat itu dijelaskan bahwa FFE diproyeksikan memiliki valuasi sekitar US\$20 miliar dengan sekitar 20% sahamnya akan dimiliki investor swasta.

Skema tersebut diharapkan membuka pendanaan senilai US\$10 miliar mulai 1 Januari 2027.

Melalui program itu, setiap asosiasi anggota berpeluang menerima hingga US\$20 juta melalui skema *fast forward* dan tambahan US\$20 juta dari FIFA Forward untuk periode 2027-2030. Total bantuan yang dapat

diterima setiap federasi mencapai US\$40 juta apabila proposal mendapat lampu hijau.

BARU SEKADAR USUL

Di tengah kritik yang terus bermunculan, Infantino menegaskan pembentukan FFE masih sebatas proposal dan bukan keputusan final. Menurutnya, seluruh proses akan tetap mengikuti mekanisme demokratis di FIFA, termasuk konsultasi dan pemungutan suara oleh para anggota.

“FIFA Forward Enterprise, atau FFE, pada dasarnya ialah sebuah proposal, sebuah tawaran. Ini bagian dari proses demokratis, proses konsultasi, dan yang terpenting merupakan sebuah peluang, bukan kewajiban,” ucap Infantino.

Infantino menilai pembentukan FFE menjadi kesempatan besar untuk mempercepat perkembangan sepak bola di seluruh dunia. Menurutnya, pengelolaan bisnis turnamen FIFA membutuhkan keahlian khusus agar potensi komersial yang selama ini belum tergarap dapat dimaksimalkan tanpa mengubah peran FIFA sebagai regulator sepak bola dunia.

BUKAN ASET DAGANGAN

Rencana FIFA membentuk FFE langsung memicu penolakan dari berbagai pemangku kepentingan sepak bola dunia. UEFA menjadi konfederasi pertama yang menyampaikan penolakan secara terbuka dengan menegaskan Piala Dunia bukan aset yang dapat diperjualbelikan.

Sebagai tindak lanjut, UEFA menjadwalkan rapat darurat virtual bersama 55 federasi anggota mereka untuk membahas respons terhadap proposal tersebut. Salah satu opsi yang mulai mengemuka ialah ancaman boikot terhadap kompetisi FIFA.

Presiden UEFA Aleksander Ceferin juga menggelar pertemuan virtual dengan lima federasi yang menaungi liga terbesar di Eropa, yakni Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, dan Prancis. Presiden Komite Olimpiade Italia sekaligus Ketua Federasi Italia Giovanni Malago mengungkapkan sikap tegas Ceferin terhadap proposal tersebut. “Presiden Ceferin menyatakan penolakannya terhadap proyek FIFA ini. Situasinya benar-benar berada dalam konflik total,” kata Malago.

Penolakan juga datang dari European Club

Association (ECA) yang menaungi sekitar 850 klub profesional di Eropa. Organisasi tersebut mengaku tidak pernah diajak berdiskusi sebelum proposal diumumkan kepada publik.

SIKAP KONFEDERASI LAIN

Tidak seperti UEFA yang langsung menolak, konfederasi lain memilih meminta FIFA memperbaiki proses konsultasi sebelum keputusan diambil. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengaku kecewa karena tidak dilibatkan dalam pembahasan sebelum proposal dipublikasikan. Menurut AFC, kebijakan strategis semestinya dibahas lebih dahulu melalui mekanisme tata kelola yang berlaku.

Sikap serupa ditunjukkan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF). Presiden CAF Patrice Motsepe mengumumkan rapat darurat Komite Eksekutif akan digelar pekan depan guna membahas proposal FIFA.

Sementara itu, CONCACAF menyoroti proses penyampaian proposal yang dinilai kurang transparan karena mereka lebih dulu mengetahui rencana tersebut melalui pemberitaan media. (I-3)

				PT OTO MULTIARTHA		Trusted Financial Solutions Provider					
Kantor Pusat: Gedung Summitas II Lt. 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Jakarta 12190, Telp.(021) 522 6410. Fax.(021) 252 6870. Website: www.otomultiarttha.com											
LAPORAN POSISI KEUANGAN				LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							
30 JUNI 2026 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)							
ASET	30 Juni 2026	31 Desember 2025			30 Juni 2026	31 Desember 2025					
ASET			LIABILITAS								
Kas dan setara kas			Pinjaman yang diterima								
Pihak berelasi	615.133	321.412	Pihak berelasi	1.798.600	1.769.188						
Pihak ketiga	290.992	126.500	Pihak ketiga	5.498.926	4.856.726						
Putang pembiayaan konsumen - bersih			Utang obligasi - bersih								
Pihak ketiga	11.550.991	11.838.632	Pihak ketiga	2.302.181	2.739.250						
Putang lain-lain - bersih			Beban yang masih harus dibayar								
Pihak berelasi			Pihak berelasi	12.133	14.281						
Pihak ketiga	1.136	263	Pihak ketiga	93.957	107.715						
	101.380	107.711	Liabilitas derivatif								
Aset derivatif			Pihak berelasi		7.852						
Pihak berelasi	96.592	13.009	Pihak ketiga	9.451	45.334						
Pihak ketiga	425.951	169.732	Liabilitas imbalan pascakerja	133.786	130.120						
Klaim pengembalian pajak	105.324	185.101	Liabilitas lain-lain	38.969	45.343						
Aset tetap - bersih	391.001	421.848	Pihak ketiga	156.224	141.050						
Aset pajak tanggahan	149.321	169.202	JUMLAH LIABILITAS	10.044.227	9.856.959						
Aset lain-lain			EKUITAS								
Pihak berelasi	6.466	4.859	Modal saham	928.707	928.707						
Pihak ketiga	96.040	105.025	Tambahan modal disetor	3.405.877	3.405.877						
			Lindung nilai arus kas	33.630	(64.888)						
JUMLAH ASET	13.830.327	13.463.294	Saldo defisit	(582.114)	(663.361)						
			Belum ditentukan penggunaannya								
			JUMLAH EKUITAS	3.786.100	3.606.335						
			JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	13.830.327	13.463.294						
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)							
	Saldo laba										
	Modal saham	Tambahan modal disetor	Lindung nilai arus kas	Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	Jumlah ekuitas					
Saldo 1 Januari 2025	928.707	3.405.877	9.995	185.742	1.095.465	5.625.786					
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	-	-	-	-	10.587	10.587					
Laba bersih periode berjalan	-	-	-	-	10.587	10.587					
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas, setelah pajak	-	-	(44.374)	-	-	(44.374)					
Jumlah rugi komprehensif periode berjalan	-	-	(44.374)	-	10.587	(33.787)					
Pembagian dividen kas	-	-	-	-	(28.558)	(28.558)					
Saldo 30 Juni 2025	928.707	3.405.877	(34.379)	185.742	1.077.494	5.563.441					
Saldo 1 Januari 2026	928.707	3.405.877	(64.888)	-	(663.361)	3.606.335					
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	-	-	-	-	81.247	81.247					
Laba bersih periode berjalan	-	-	-	-	81.247	81.247					
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas, setelah pajak	-	-	98.518	-	-	98.518					
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	-	-	98.518	-	81.247	179.765					
Saldo 30 Juni 2026	928.707	3.405.877	33.630	-	(582.114)	3.786.100					
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				LAPORAN ARUS KAS							
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI							



PT SUMMIT OTO FINANCE

Trusted Financial Solutions Provider

Kantor Pusat: Gedung Summitmas II Lt. 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Jakarta 12190, Telp.(021) 252 2788. Fax.(021) 252 6388. Website: www.summitotofinance.com

LAPORAN POSISI KEUANGAN

30 JUNI 2026

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	30 Juni 2026	31 Desember 2025	LIABILITAS DAN EKUITAS	30 Juni 2026	31 Desember 2025
ASET			LIABILITAS		
Kas dan setara kas			Pinjaman yang diterima		
Pihak berelasi	784.881	388.974	Pihak berelasi	3.898.860	3.448.350
Pihak ketiga	304.361	109.533	Pihak ketiga	9.134.791	7.255.200
Putang pembiayaan konsumen - bersih			Utang obligasi - bersih		
Pihak ketiga	16.489.942	14.887.351	Pihak ketiga	1.497.969	1.496.639
Putang lain-lain - bersih			Beban yang masih harus dibayar		
Pihak berelasi	1.201	273	Pihak berelasi	37.575	35.258
Pihak ketiga	168.473	141.048	Pihak ketiga	145.436	140.801
Aset derivatif			Liabilitas derivatif		
Pihak berelasi	215.194	35.750	Pihak berelasi	-	16.675
Pihak ketiga	561.833	178.385	Pihak ketiga	57.652	222.052
Klaim pengembalian pajak	36.467	36.467	Liabilitas imbalan pascakerja	274.953	259.872
Aset tetap - bersih	373.988	378.156	Liabilitas lain-lain	62.368	71.342
Aset pajak tangguhan	88.788	236.269	Pihak berelasi	340.144	295.110
Aset lain-lain			JUMLAH LIABILITAS	15.449.748	13.241.299
Pihak berelasi	9.528	8.863	EKUITAS		
Pihak ketiga	229.165	183.827	Modal saham	2.442.060	2.442.060
			Tambahan modal disetor	887.186	887.186
			Lindung nilai arus kas	72.972	(137.646)
			Saldo laba		
			Telah ditentukan penggunaannya	122.103	122.103
			Belum ditentukan penggunaannya	309.752	29.894
JUMLAH ASET	19.283.821	16.584.896	JUMLAH EKUITAS	3.834.073	3.343.597
			JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	19.283.821	16.584.896

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal saham	Tambahan modal disetor	Lindung nilai arus kas	Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	Jumlah ekuitas
Saldo 1 Januari 2025	2.442.060	887.186	20.592	488.412	312.856	4.151.106
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	-	-	-	-	97.929	97.929
Laba bersih periode berjalan	-	-	-	-	-	-
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas, setelah pajak	-	-	(56.836)	-	-	(56.836)
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	-	-	(56.836)	-	97.929	41.093
Pembagian dividen kas	-	-	-	-	(134.527)	(134.527)
Saldo 30 Juni 2025	2.442.060	887.186	(36.244)	488.412	276.258	4.057.672
Saldo 1 Januari 2026	2.442.060	887.186	(137.646)	122.103	29.894	3.343.597
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	-	-	-	-	300.458	300.458
Laba bersih periode berjalan	-	-	-	-	-	-
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas, setelah pajak	-	-	210.618	-	-	210.618
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	-	-	210.618	-	300.458	511.076
Pembagian dividen kas	-	-	-	-	(20.600)	(20.600)
Saldo 30 Juni 2026	2.442.060	887.186	72.972	122.103	309.752	3.834.073

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAJIN

UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2026	30 Juni 2025
PENDAPATAN		
Pendapatan		
Pihak ketiga	2.400.131	1.987.961
Transaksi pembiayaan lain-lain		
Pihak berelasi	8.324	6.164
Pihak ketiga	59.482	49.931
JUMLAH PENDAPATAN	2.467.937	2.044.056
BEBAN		
Gaji dan tunjangan karyawan		
Pihak berelasi	(17.912)	(13.631)
Pihak ketiga	(503.400)	(418.598)
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(701.301)	(753.089)
Beban keuangan		
Pihak berelasi	(108.332)	(135.407)
Pihak ketiga	(359.725)	(261.665)

AGNEZ MO

Bawa Pencak Silat dan Kerambit di Serial TV AS

Dalam pencak silat, ada banyak teknik yang disebut sebagai jurus, yaitu cara atau gerakan tertentu dalam mengeksekusinya.



INSTAGRAM @AGNEZMO

MUSIKUS sekaligus pemain peran Agnez Mo menyebut mendapat inspirasi gerakan dalam adegan pertarungan di serial *Reacher* 4 dari pencak silat. Hal itu disampaikan Agnez ketika ditanya mengenai gaya bertarungnya di serial televisi Amerika Serikat itu.

“Karena meskipun kami tidak secara spesifik menyatakan bahwa gerakan itu terinspirasi dari pencak silat, seni bela diri khas Indonesia, kami mencoba memasukkannya ke dalam koreografi tarian tersebut,” ungkap Agnez, seperti dikutip dari saluran *Youtube Six Degrees of Geek*.

Salah satu unsur dalam pencak silat yang dimasukkannya ialah jurus. Selain itu, ia menggunakan kerambit sebagai alat berlatih.

“Dalam pencak silat, ada banyak teknik yang kami sebut sebagai jurus, yaitu cara atau gerakan tertentu dalam mengeksekusinya. Selain itu, ada juga kerambit, pisau khas Indonesia yang merupakan salah satu senjata dalam seni bela diri pencak silat,” jelas Agnez.

Setelah mendapatkan saran dari salah satu *stuntman*, Agnez pun membawa kerambit tiruan sebagai alat untuk berlatih.

“Saya ingat salah satu anggota tim *stuntman* pernah berkata, ‘Ag, sebaiknya kamu berlatih setiap hari’. Jadi, saya selalu membawa kerambit tiruan di dalam tas ke mana pun saya pergi selama di Toronto,” ungkap pelantun hit *Cinta tak Ada Logika* itu.

Namun, ia mengaku pernah menerima teguran dari seorang pelayan restoran karena membawa kerambit tiruan. Pelayan itu mengira bahwa senjata tersebut asli.

“Suatu hari, saat berada di sebuah restoran, saya berpikir untuk memanfaatkannya sambil berlatih. Namun, seorang pelayan mendatangi saya dan berkata, ‘Bisa tolong simpan benda itu?’” kenang Agnez Mo.

“Saya langsung merespons, ‘Eh, tidak apa-apa, ini cuma barang mainan! Saya janji ini cuma tiruan!’” lanjutnya. (Medcom.id/M-2)

BTS

Protes atas Kategori Grammy

Kategori baru yang diperkenalkan Recording Academy disebut mengisolasi musikus Asia dari kategori utama.



INSTAGRAM @BTS.BIGHITOFFICIAL

BTS mengumumkan tidak akan mendaftarkan karya musik mereka untuk ajang Grammy Awards ke-69 tahun depan. Keputusan itu disampaikan langsung oleh ketujuh anggota, yakni RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook, melalui akun *Instagram* pribadi mereka pada Rabu (29/7). Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kategori baru yang diluncurkan Recording Academy.

‘Kami berharap musik kami dapat didengar dan dicintai apa adanya, alih-alih dipisahkan wilayah atau bahasa’, tulis para *member* BTS.

Langkah itu menandai sikap tegas grup tersebut terhadap kebijakan industri musik global. Kebijakan tersebut berupa langkah Recording Academy yang memperkenalkan kategori *best Asian pop music performance* pada Juni lalu. Kategori itu ditujukan untuk mengapresiasi musik pop dari Asia seperti *K-pop*, *J-pop*, dan *C-pop*.

Namun, banyak pihak menilai kategori tersebut justru mengisolasi musikus Asia dari kategori utama (*general field*) seperti *pop duo/group performance* yang sebelumnya pernah ditempati BTS. Padahal, BTS baru saja mencapai puncak popularitas baru pascawajib militer dengan merilis album studio kelima bertajuk *Arirang* pada Maret 2026. Album tersebut sukses merajai tangga lagu *Billboard* dan diprediksi menjadi kandidat kuat pemenang Grammy. Selain itu, BTS baru saja mencetak sejarah dengan tampil di *halftime show* final FIFA World Cup 2026 di New Jersey.

Industri musik Korea Selatan pun terbelah dalam menanggapi fenomena itu. Sebagian melihat kategori baru sebagai pengakuan, tetapi sebagian besar kritikus sepakat dengan BTS bahwa pengelompokan berdasarkan etnisitas atau wilayah merupakan langkah mundur bagi inklusivitas musik global. (*/The Korea Herald/M-2)

FEDI NURIL

Belajar Pola Komunikasi Ayah dan Anak

- Konflik ayah dan anak begitu dekat dengan realitas masyarakat.
- Belajar soal konsep maskulinitas yang selalu menjadi perdebatan karena berubah sesuai zaman.
- Melatih *skill* dengan terjun di genre drama komedi.

FATHURROZAK

fathur@mediaindonesia.com

SEBAGAI seorang ayah, aktor Fedi Nuril memiliki kekhawatiran tidak bisa dekat dengan sang anak. Meski demikian, ia juga tak mau terlalu protektif. Namun, lewat film terbarunya, *Bapakmu Kiper*, Fedi justru mendapatkan pelajaran tentang pola komunikasi antara ayah dan anak.

Film yang dibalut dengan drama komedi dengan latar belakang dunia sepak bola tarkam (an-tarkampung) itu mengikuti kisah Warto dan anaknya, Dino, yang tak dekat. Warto menjadi orangtua tunggal untuk Dino. Di film itu, Ferdi dan Ali Fikry juga kembali reuni dengan peran ayah-anak.

“Waktu pertama kali ditawari, pas *denger* judulnya langsung tertawa karena teringat ledekan zaman dulu, tapi justru dialog ‘bapakmu kiper’ itu muncul di saat yang menyentuh. Ada arti yang menyentuh juga,” kata Fedi saat konferensi pers di XXI Epicentrum, Selasa (28/7).

Dengan tema latar belakang karakter dan dunia yang juga sangat ‘*macho*’, yakni sepak bola, film itu membawa Fedi pada pergulatan tentang tema maskulinitas, bagaimana sosok ayah dan anak laki-laki dibentuk.

“Maskulinitas itu selalu jadi perdebatan dan selalu berubah, bagaimana maskulinitas zaman sekarang, dengan cerita hubungan bapak dan anak. Saya juga ada kekhawatiran tidak dekat dengan anak saya, tapi kita tidak bisa lepas tangan, harus selalu dekat dengan anak kita, itu yang ingin saya pelajari lewat film ini,” ungkapnya.

KONFLIK AYAH DAN ANAK DEKAT DENGAN REALITAS

Bagi Fedi, film yang menarasikan adanya konflik antara Warto (ayah) dan Dino (anak) terasa dekat dengan kehidupan nyata. Terlebih, dirinya juga memiliki tiga anak laki-laki sehingga dapat memahami bagaimana seorang ayah terkadang kesulitan menunjukkan kasih sayang kepada anak dengan cara yang tepat.

“Apa yang dialami karakter Warto dan Dino di film ini mungkin banyak dialami anak laki-laki dan ayahnya. Apalagi saya sendiri punya tiga anak

laki-laki, ya. Jadi, memahami posisi Warto, di balik ketidakakurannya itu sebenarnya hanyalah ketidakmampuan seorang ayah untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang yang besar dengan benar saja,” ujar Fedi.

“Jadi, cerita tentang kedekatan emosional yang dipadukan dengan dunia sepak bola antarkampung saya rasa akan menyentuh hati banyak keluarga Indonesia, tapi jarang diangkat secara utuh ke layar lebar. Menurut saya, itu yang membuat *Bapakmu Kiper* terasa spesial. Film ini lucu, hangat, dan sangat bumi,” lanjutnya.

TERJUN KE PROYEK DRAMA KOMEDI

Selama ini, Fedi dikenal dengan peran-peran seriusnya di genre drama. Namun, masuk ke proyek drama komedi, imbuh Fedi, menjadi kebutuhan untuk melatih *skill*-nya sebagai aktor.

Salah satu adegan komedi yang ditunjukkan di trailer terbaru ialah Fedi mengajak seekor ikan untuk ikut meneriakan *chant* layaknya supporter bola.

“Walau film saya mayoritas drama, kalau mau santai di rumah, itu saya *nontonnya* komedi atau *romcom*. Buat saya, komedi itu susah, tapi perlu juga ambil *project* komedi untuk melatih *skill*. Ke depan pasti akan ada (komedi) lagi karena saya suka genrenya, jadi akan terus ada,” ucap Fedi.

Salah satu pengalaman tak terlupakan Fedi di film itu ialah bermain bola dengan para pemain tarkam sungguhan. Ia bahkan mengungkapkan jempolnya sempat cedera karena harus menahan tendangan salah satu pemain tarkam yang ada di adegan film.

Memerankan kiper pun jadi hal baru bagi Fedi, yang selama masa sekolah dan kuliah selalu menjadi bek saat bermain bola.

“Dulu diminta jadi kiper karena tinggi badan saya, tapi saya enggak mau karena ingin main yang lebih dinamis. Jadi, untuk film ini ada juga pelatih kipernya. Saya latihan selama dua minggu sebelum syuting dan selama syuting juga didampingi,” tuturnya.

Film *Bapakmu Kiper* disutradarai Ody C Harahap dan diproduksi Entelekey Sinema Indonesia (ESI), rumah produksi yang berada di bawah naungan Entelekey Media Indonesia. Film itu juga menandai debut produksi ESI secara mandiri. *Bapakmu Kiper* dijadwalkan tayang di bioskop mulai 3 September. (M-2)

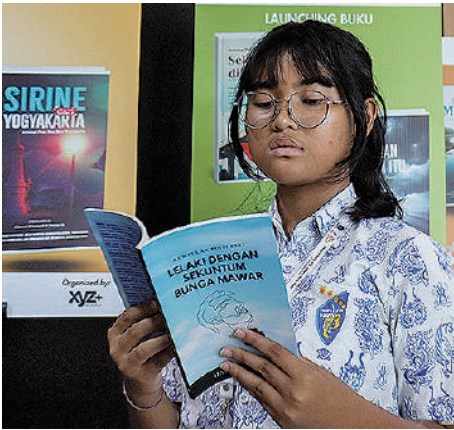


INSTAGRAM @FEDINURIL

ON THIS DAY - 31 JULI

2000: Hari Sastra Nasional Dideklarasikan

MASYARAKAT Sastra Jakarta (MSJ) mendeklarasikan Hari Sastra Nasional pada 31 Juli 2000. Deklarasi tersebut dilakukan bertepatan dengan hari kelahiran Hans Bague (HB)



MI/USMAN ISKANDAR

Jassin, salah satu tokoh penting dalam perkembangan sastra Indonesia. Namun, deklarasi itu sempat menuai kontroversi di kalangan sejumlah sastrawan yang hadir. Hari Sastra Nasional dipilih berdasarkan tanggal lahir HB Jassin, yakni 31 Juli. Deklarasi dilakukan MSJ, kelompok pecinta sastra yang saat itu diketuai Korrie Layun Rampan. Korrie membacakan deklarasi tersebut bersama dua rekannya.

Menurut Korrie, Jassin merupakan salah satu tokoh senior dalam kesusastran Indonesia yang memiliki peran besar dalam mendokumentasikan dan mengkritik karya sastra. Jassin juga dikenal sebagai kritikus sastra yang secara konsisten menjalankan perannya selama sekitar empat dasawarsa.

Jassin lahir di Gorontalo pada 31 Juli 1917 dan dikenal luas sebagai ‘Paus Sastra Indonesia’. Ia bukan hanya kritikus, melainkan juga dokumentator sastra yang mengarsipkan berbagai karya dan tulisan penting para sastrawan Indonesia. Koleksi dokumentasinya kemudian menjadi bagian penting dalam perkembangan studi sastra Indonesia.

2003: Gunung Gamalama Meletus

GUNUNG Gamalama di Ternate, Maluku Utara, meletus pada siang hari, sekitar pukul 14.35 WIT, mengeluarkan abu vulkanis setinggi sekitar 500 meter. Letusan kedua terjadi sekitar pukul 16.15 WIT.



ANTARA

di Maluku Utara.

Gamalama memiliki sejumlah kawah, antara lain Kawah Arfat, Madiena, K1, K2, K3, K4, Danau Laguna, Tolire Jaha, dan Tolire Kecil. Aktivitas vulkanisnya telah tercatat sejak 1538 dan gunung itu termasuk salah satu gunung api yang cukup sering meletus. Sebelum letusan 2003, erupsi terakhir Gamalama tercatat pada 1996. Dalam sejarahnya, letusan pada 12 Agustus 1673 dan 1838 dilaporkan menimbulkan korban jiwa. Dalam catatan sejarahnya, Gunung Gamalama telah mengalami puluhan kali erupsi dengan karakter letusan yang umumnya berupa semburan abu dan material vulkanis.

2006: Castro Serahkan Kekuasaan

FIDEL Alejandro Castro Ruz ialah pemimpin Kuba yang berkuasa sejak Revolusi Kuba pada 1959. Ia menjabat perdana menteri Kuba pada



AFF

1959-1976, kemudian menjadi presiden sejak 1976. Sejak 1965, Castro juga menjabat Sekretaris Pertama Partai Komunis Kuba. Di bawah kepemimpinannya, Kuba berubah menjadi negara sosialis dengan sistem satu partai. Fidel Castro juga memegang kendali atas Angkatan Bersenjata Kuba sebagai panglima tertinggi.

Pada 31 Juli 2006, Castro untuk pertama kalinya menyerahkan sementara sejumlah kekuasaannya kepada adiknya, Raul Castro, karena harus menjalani operasi dan pemulihan akibat masalah kesehatan. Raul, yang saat itu menjabat Wakil Presiden Pertama Dewan Negara sekaligus menteri pertahanan, mengambil alih kepemimpinan sementara Kuba.

Pengalihan kekuasaan tersebut menjadi peristiwa penting karena merupakan kali pertama Fidel Castro menyerahkan kendali pemerintahan sejak berkuasa pada 1959. Pengumuman itu juga dilakukan menjelang ulang tahunnya yang ke-80 pada 13 Agustus 2006.